

**STRATEGI PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(IKM) BERBASIS *LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (LED)**
(Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:
NUR SRI UTAMI PUTRI
NIM.115030107111053



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

MOTTO

“If you fall a thousand times, stand up millionsof times because you do not know how close you are to success”

“Jika Anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena Anda tidak tahu seberapa dekat Anda dengan kesuksesan”

-Kata Kata Mutiara

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah di pertahakan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada tanggal:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2016
Jam : 08.00 WIB
Di susun oleh : Nur Sri Utami Putri
Judul : Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Berkas *Local Economic Development* (LED) (Studi Pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)

Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Penguji I



Dr. Hermawan, SIP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Penguji II



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Marmer Berbasis *Local Economic Development* (LED) (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)

Disusun Oleh : Nur Sri Utami Putri

NIM : 115030107111053

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 7 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Dr. Minto Hadi, Msi
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul "**Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Marmer Berbasis *Local Economic Development* (LED) (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)**" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 8 Desember 2016



Nur Sri Utami Putri

115030107111053

RINGKASAN

Nur Sri Utami Putri, 2017, Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis *Local Economic Development* (LED)(Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung). Ketua: Drs. Heru Ribawanto, MS. Anggota: Drs. Minto Hadi, M.Si, 118+xiii.

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang digunakan untuk melatih kegiatan ekonomi lokal melalui kerjasama antara sektor pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang ada di daerahnya. Dalam perkembangannya pemerintah kabupaten Tulungagung melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian sosial guna penyejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar serta pemerataan kesempatan berwirausaha sehingga adanya pemerataan pendapatan, dengan melakukan tata kelola UKM yang tepat berbasis *Local Economic Development* (LED) dalam pelaksanaan pengembangan industri yang terdapat di Sentra industri ini tepatnya berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis *Local economic Development* (LED).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pertama tentang Strategi pemberdayaan IKM berbasis LED di Kabupaten Tulungagung. Aspek yang akan diteliti yaitu Peningkatan Kualitas dan standarisasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses pemasaran, peningkatan kemitraan, peningkatan akses permodalan. Kedua Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari upaya pemberdayaan IKM di Kabupaten Tulungagung, hal ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa Miles, Huberman dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan merupakan pendekatan utama dalam strategi pemberdayaan ikm di Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya strategi pemberdayaan IKM tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas produk ikm, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengetahui arah pemasaran, meningkatkan kemitraan dan meningkatkan akses permodalan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Saran dari penelitian ini adalah Disperindag sebaiknya memberikan kemudahan dalam kebutuhan dana bagi pengrajin kecil sehingga perputaran produksi IKM tidak hanya dirasakan oleh pengrajin besar akan tetapi pada pengrajin kecil juga. Dan untuk pelaku IKM sebaiknya tidak bergantung sepenuhnya dengan Disperindag saja.

Kata kunci: Pemberdayaan, IKM, Marmer

SUMMARY

Nur Sri Utami Putri, 2017, Empowerment Strategies of Small and Middle Industries (IKM) Based on Local Economic Development (LED) (Study on service trade and industry of Tulungagung district). Primary Supervisor: Drs. Heru Ribawanto, MS. Second Supervisor: Drs. Minto Hadi, M.Si, 118+xiii.

Local economic empowerment is an economic development concept that is used to train local economic activity through cooperation between the local government sector, private sector and communities in the utilization of local economic resources that exist in the region. In the development of the district of Tulungagung through the agency of Industry and Trade impose social control in order to empowerment economic life of the surrounding communities and equal opportunity of entrepreneurship so that their equal distribution of income, by conducting the governance of UKM, ease of funding and training to businesses marble in Tulungagung engineers technology and so forth in order to base the Local Economic development (LED) can actually be applied in the implementation of the industrial development of marble contained in this industry center precisely located in the district of Besuki Tulungagung. The purpose of this study are: Identify, describe and analyze the factors supporting and empowering to the Government in Tulungagung in Empowering Small and Middle Industries (SMI) based Local economic Development (LED).

This study used is descriptive research with a qualitative approach. The first focus of this study on strategies empowering SMI based LED in Tulungagung. Aspects to be researched is the Quality Improvement and standardization of products, improving the quality of human resources, increase market access, promoting partnerships, increasing access to capital. Second, Factors inhibiting and supporting factors of empowerment Small and Medium Industries in Tulungagung district, to improve public income in Tulungagung district. Technique to gain the data was done by interview, observation, and documentation. The data analysis used analysis model of Miles, Huberman, and Saldana.

Based on the results of research show that socialization and training is the main approach of the strategy of empowering small and medium industries in Tulungagung district. With the strategy of empowering Small and Medium Industry is considered effective to improve product quality of Small and Medium Industry, improving the quality of human resources, know the direction of marketing, improve partnerships and increasing access to capital, to improve public income in Tulungagung district.

Suggestions from this study is the Department of Industry and Trade should provide facilities in need of funds for small artisans so that rotation of the Small and Medium Industrial production is not only felt by the great craftsmen but in small artisans also. And for Small and Medium Industry players should not rely entirely by the Department of Industry and trade only.

Keyword: Marble, IKM, Empowering

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Berbasis *Local Economic Development* (LED)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto , MS selaku dosen pembimbing pertama, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan keilmuan dan bagi kemajuan Indonesia.

Malang, 7 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Isi	Hal
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	13
1. Administrasi Publik	13
2. Administrasi Pembangunan	15
B. Pemberdayaan	18
1. Pengertian Pemberdayaan	18
2. Tujuan Pemberdayaan	19
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan	20
C. Local Economic Development (LED)	22
1. Konsep Local Economic Development (LED)	22
D. Pembangunan Ekonomi Lokal	25
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Lokal	25
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Lokal	25
E. Industri Kecil dan Menengah (IKM)	26
1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM)	26
F. Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	31
G. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan industri Marmer Kabupaten Tulungagung	36
1. Location Quotient	36
2. Diamond Cluster Model	37
3. Analisis SWOT	38
H. Teori Strategi	40
1. Tingkat-Tingkat Strategi	42
I. Kerangka Berfikir	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Gambaran Tempat Penelitian	57
2. Tata kelola LED pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63
3. Gambaran Metode Penelitian	67
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	75
1. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis <i>Local Economic Development (LED)</i>	76
2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tulungagung berbasis <i>Local Economic Development (LED)</i>	94
C. Pembahasan Hasil Penelitian	102
1. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis <i>Local Economic Development (LED)</i>	102
2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tulungagung berbasis <i>Local Economic Development (LED)</i>	105

BAB V PENUTUP

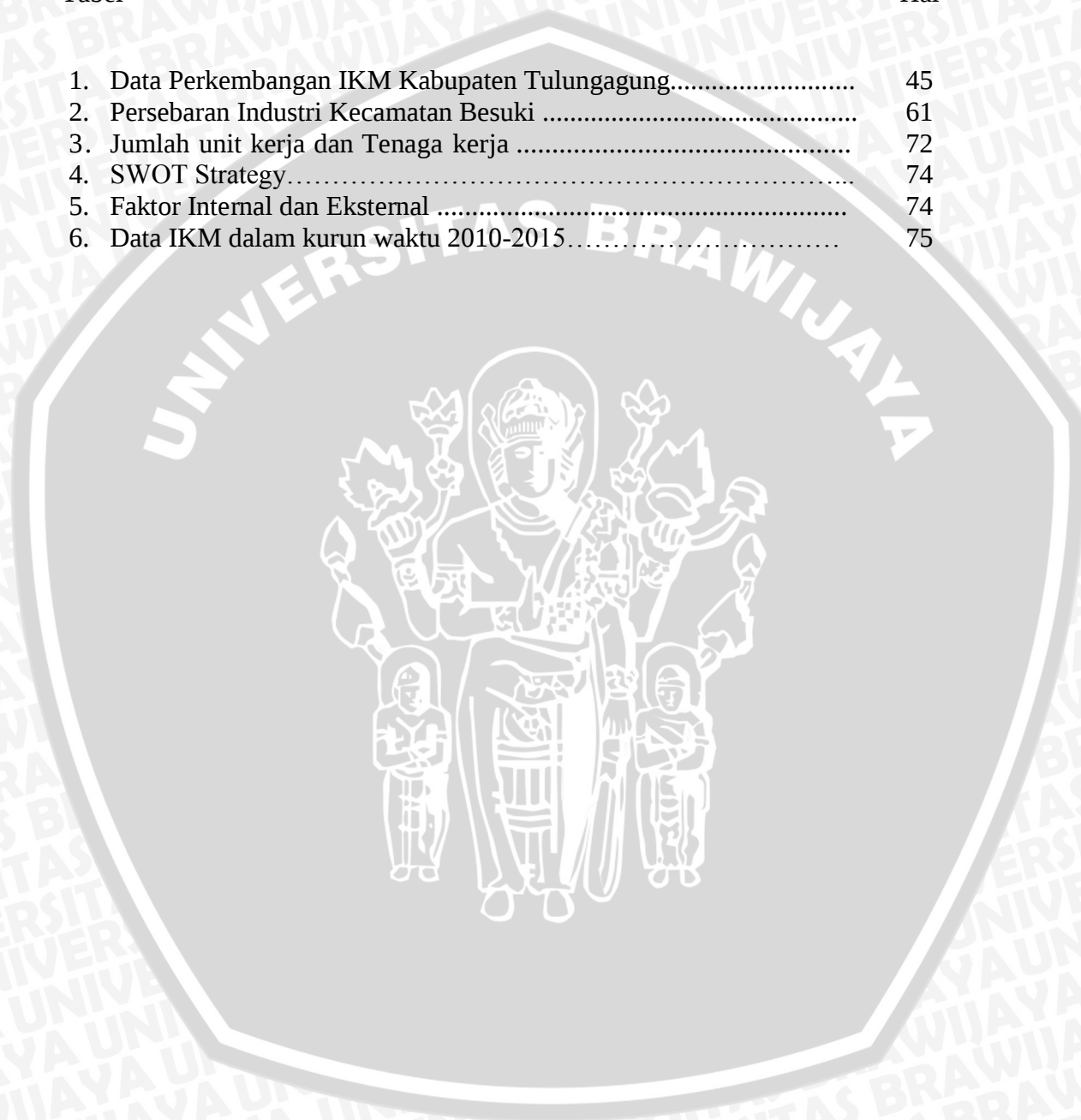
A. Kesimpulan	108
1. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) marmer berbasis <i>Local Economic Development (LED)</i>	108
2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Marmer di Kabupaten Tulungagung berbasis <i>Local Economic Development (LED)</i>	111
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

115

Daftar Tabel

Tabel	Hal
1. Data Perkembangan IKM Kabupaten Tulungagung.....	45
2. Persebaran Industri Kecamatan Besuki	61
3. Jumlah unit kerja dan Tenaga kerja	72
4. SWOT Strategy.....	74
5. Faktor Internal dan Eksternal	74
6. Data IKM dalam kurun waktu 2010-2015.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. <i>Diamond Cluster Model</i>	37
2. <i>SWOT Straregy</i>	39
3. Kerangka Berfikir Penelitian.....	44
4. Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	55
5. Hasil Kerajinan IKM Marmer Kecamatan Besuki.....	81
6. Hasil Kerajinan IKM Marmer Kecamatan Besuki.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien, dan kompetitif. Cadangan devisa Indonesia pun masih kalah banyak dengan cadangan devisa negeri tetangga. Ini membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengentaskan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkan kembangkan industri dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai *basic* pembangunan ekonomi kerakyatan.

Namun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. UMKM harus menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain (Sudaryanto, Ragimun, dan Rina Wijayanti: *Strategi*

Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean). Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan. Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikemukakan di atas, pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Indonesia.

Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain Industri Kecil dan Menengah (IKM) berperan dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pengurangan masalah pengangguran yang dimana tingkat pengangguran pada umur yang masih produktif masih sangat tinggi. Pengembangan IKM adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Industri Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Definisi Pemerintah sebagai pengelola kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi daerahnya juga terkandung dalam *The Relationship between Governance Effectiveness and Entrepreneurship* (2011), yang dikemukakan oleh Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2008).

“Define governance as traditions and institutions by which authority in a country is exercised, the ability of government to formulate and administer policy, and the respect government receives from its citizens. Effective governance has been shown to be related with economic growth (Huynh and Jacho-Chávez, 2009; Malik, 2002) and per capita income (Kaufmann and Kraay, 2002).”

“Kepemerintahan adalah institusi tradisional yang memiliki otoritas atau pembuat kebijakan dalam sebuah negara, kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengelola kebijakan dan mendapatkan penghormatan dari warganya telah terbukti efektif dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (Huynh dan Jacho-Chavez, 2009; Malik, 2002) dan pendapatan perkapita (Kaufmann dan Kraay, 2002)”.

Selain itu menurut *The Effects of Organizational Culture on Corporate Entrepreneurship* (2014), yang dikemukakan oleh Zahra (1993-1996).

“Suggested that corporate entrepreneurship is consisted of three dimensions as innovation, corporate venturing and strategic renewal”

“Mengajukan bahwa berwirausaha terdiri dari tiga dimensi inovasi, memberikan peluang dan memberikan strategi pembaharuan”.

Sesuai dengan tujuan pemberdayaan IKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang tercantum dalam pasal 5 Undang Undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Mewujudkan stuktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan IKM menjadi industri kecil menengah yang tangguh dan mandiri

3. Meningkatkan peran IKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Selain itu, secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) dengan Usaha Besar. (Nursalam: 2010 hal 5-6). Kebijakan perkreditan yang khusus diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengatasi kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan juga sudah banyak yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Nursalam: 2010, hal 7).

Upaya-upaya diatas secara garis besar menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Strategi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu penerapan strategi dapat menentukan hasil yang akan dicapai. Adapun strategi yang dimaksud disini adalah strategi manajemen dalam memberdayakan UMKM yang lebih berorientasi pada pengembangan strategi secara makro. Melihat kondisi kekinian tentunya peran seluruh *stakeholder* dalam implementasi dari

strategi pemberdayaan tersebut sangat diharapkan dengan mengacu pada *local content*.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tulungagung seharusnya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa IKM yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi permasalahan pelaku IKM di Kabupaten Tulungagung. Merujuk dari data RPJMD Kabupaten Tulungagung serta mengingat pentingnya SDM dalam proses pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga memiliki daya saing yang seimbang dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha IKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar dalam meningkatkan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Sejak lahirnya otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, telah menimbulkan harapan baru bagi terciptanya pemerataan pembangunan. Sebagai upaya melaksanakan pembangunan daerah, pihak yang menjadi kunci penyelenggaraan pembangunan adalah pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Berkaitan dengan pembangunan daerah, identifikasi awal terletak pada pencarian potensi daerah tersebut. Potensi sebuah daerah merupakan modal

penting dalam suatu pembangunan. Dalam mengoptimalkan potensi yang ada, pemerintah harus secara serius memanfaatkan potensi tersebut. Lebih baik lagi potensi ini harus termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Tahunan milik daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi masing-masing kepala daerah. Setiap kepala daerah mempunyai tanggung jawab meningkatkan perekonomian daerah atau ekonomi lokal yang sehingga sebuah daerah mampu bersaing dengan daerah lain. Karena segala macam bentuk pembangunan dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang digunakan untuk melatih kegiatan ekonomi lokal melalui kerjasama antara sektor pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang ada di daerahnya. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal ini, setiap daerah dituntut untuk mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya otonomi daerah. Prinsip utama dalam implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah kemitraan. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi seperti yang dikutip dari Blakely (dalam yunitasari, 2013 hal 11).

Pengelolaan potensi bahan galian gol C (batu gamping, marmer dan fosfat) ke dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pembangunan di daerah dengan berdasar pada potensi sumber daya alam yang tertuang dalam teori *Local Economic Development (LED)*. Pembangunan juga diartikan sebagai

pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat. Salah satu hasil alam yakni potensi bahan galian. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 (1) yang berbunyi sebagai berikut “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Sektor galian yang akan dibahas dalam peneliti kali ini adalah potensi bahan galian gol C salah satunya yaitu marmer. Dengan melihat topografis Kabupaten Tulungagung yang pada umumnya di dominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam membuat daerah ini kaya akan potensi bahan galian gol C (batu gamping, marmer dan fosfat) mengakibatkan daerah ini berkembang menjadi sentra industri kerajinan batu marmer dan onyx, sentra industri ini tepatnya berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Dalam perkembangannya pemerintah kabupaten Tulungagung melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian sosial guna penyejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar serta pemerataan kesempatan berwirausaha sehingga adanya pemerataan pendapatan, dengan melakukan tata kelola UKM yang tepat, kemudahan dalam pendanaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha marmer di Kabupaten Tulungagung perekayasa teknologi dan lain sebagainya agar basis *Local Economic Development (LED)* dapat benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan industri marmer

yang terdapat di Sentra industri ini tepatnya berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Pertimbangan dengan berbagai faktor seperti tersedianya pemasok, suku cadang, kemampuan SDM dan lain sebagainya. Sementara itu dalam menentukan *layout* yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan utamanya yakni optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM), bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penyangga perekonomian rakyat yang perlu memperoleh pembinaan dan perlindungan secara intensif. Tujuan pembinaan dan perlindungan IKM adalah untuk:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan ekonominya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri;

Dengan mengacu pada hal tersebut diatas, pelaksanaan *Local Economic Development* (LED) yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung sebagai upaya pengembangan IKM marmer di Sentra industri ini tepatnya berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat daya saing perkonomian. Pelatihan *Local Economic Development* (LED) ini dirancang sejalan dengan program nasional Revitalisasi Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Daerah. Merujuk pada latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan judul” **Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Berbasis *Local Economic Development (LED)* (studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)**”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis *Local Economic Development (LED)*?
2. Apa saja Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tulungagung berbasis *Local Economic Development (LED)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis *Local economic Development (LED)*
2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), untuk menghasilkan kebijakan alternatif untuk

masalah tersebut dengan mengadopsi konsep *Local economic Development (LED)*.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian keilmuan, dalam hal ini kajian Ilmu Administrasi Publik pada umumnya tentang Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Berbasis *Local Economic Development*.
- b) Diharapkan karya tulis ini dapat digunakan sebagai literature, khusus mengenai Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Berbasis *Local Economic Development*.

2. Kontribusi Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan instansi dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Berbasis *Local Economic Development*.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung mengenai Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Berbasis *Local Economic Development*.

E. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan antara lain, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang gambaran latar belakang masalah yang diteliti, yang diperoleh dari historikal, ekonomi, sosial, budaya, fenomena sosial, fakta-fakta empirik, serta kejadian-kejadian dalam masyarakat, yang telah terpublikasi dalam media masa. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dasar yang hendak dicari jawabannya dari penelitian kualitatif. Tujuan penelitian merupakan operasionalisasi dari rumusan masalah yang menjadi tujuan akhir penelitian kualitatif. Kontribusi penelitian menjelaskan tentang manfaat secara teoritis dan secara praktis: bagi pihak yang memiliki implikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan hasil penelitian. Kemudian sistematika penulisan berisikan tentang sistematika atau susunan penulisan mulai dari Bab awal hingga Bab akhir.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang : teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, hasil penelitian maupun pendapat ahli, boleh tanya pada yang *expert* (praktisi, ilmuwan dll). Menjelaskan alur pemikiran dalam bentuk diagram maupun diskripsi. Teori-teori yang digunakan antara lain adalah Teori Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan, Konsep *Local Economic Development* (LED), Teori Strategi.

BAB III : METODE PENELITIAN

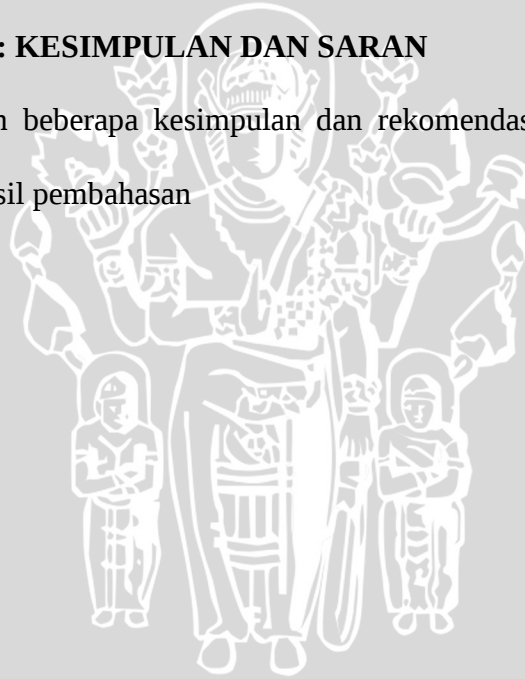
BAB ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat tentang penyajian data, hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan peneliti dalam menjawab rumusan masalah berdasarkan fokus penelitian terkait dengan semua permasalahan yang diangkat.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Mengemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil pembahasan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Administrasi Publik

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan administrasi. Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan.

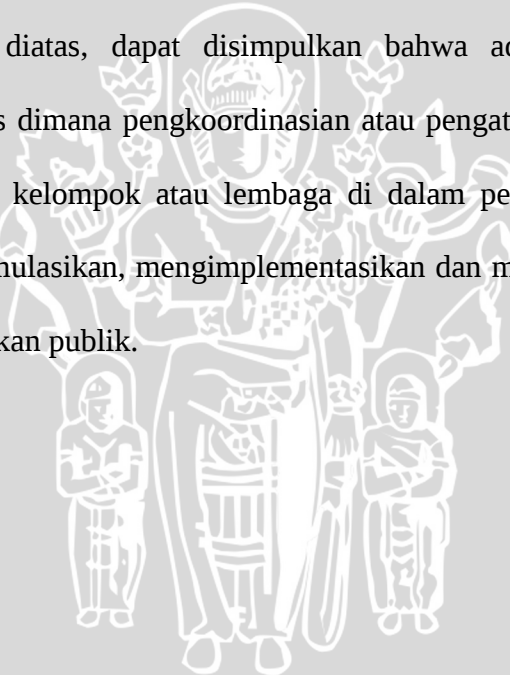
Secara etimologi istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya *to administer*. Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (2004), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan).

Administrasi publik adalah merupakan bentuk aksi dari pemerintahan, atau merupakan alat/sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Administrasi publik sebagai satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan manusia dan barang yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial kolektif, melibatkan berbagai macam ilmu sosial (Robert Presthus, 1975 dalam Darmadi 2009:137).

Administrasi publik adalah *public administration may be defined as the coordinating of individual and group efforts to carry out public policy*. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik (Pfiffner & Petrus, 1960 dalam Syafri 2011:20).

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan dalam kebijakan publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses dimana pengkoordinasian atau pengaturan dari berbagai proses kerjasama antar kelompok atau lembaga di dalam pemerintahan, untuk membuat atau memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola beberapa keputusan dalam kebijakan publik.



2. Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi pembangunan menurut Siagian (1979: 2) meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan. Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai industri atau rangkaian industri pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dari pengertian administrasi dan pembangunan diatas maka administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari keputusan keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih bertujuan sebagai industri atau rangkaian industri pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dari pengertian di atas maka. Siagian (1979: 3) menganalisis terdapat ide pokok yang perlu diperhatikan apabila berbicara tentang pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan, dimana proses tersebut terbagi menjadi tahap tahap yaitu berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

- b. Bahwa pembangunan merupakan industri secara sadar dilaksanakan.
- c. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Bahwa pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas diartikan sebagai cara hidup baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka industri peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- e. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama aspek politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- f. Bahwa kesemua hal yang telah disebutkan diatas ditujukan kepada industri membina bangsa dan Negara yang ditentukan sebelumnya.

Penjelasan lain dari Tjokroamidjojo (dalam Sari, 2014: 23), menyebutkan ada beberapa ciri utama dari Administrasi Pembangunan, yaitu:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksananya maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta

mempengaruhi tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksananya melalui proses politik.

- c. Administrasi pembangunan berorientasi pada industri-industri yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk industri masyarakat di masa depan
- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif. Yang terakhir juga dapat disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen bagi pencapaian tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “*development agent*”.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan diberbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam adminitrasi pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*Change Agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecah masalah.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Levin (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:27)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

World Bank (dalam Mardikanto dan Soebito, 2012:27) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, gagasan-gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu konsep, metode, produk dan tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian.

Dalam pengertian tersebut, menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:28) pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- b. Perbaikan kesejahteraan social berupa pendidikan dan kesehatan.
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- d. Terjaminnya keamanan.
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya.

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (dalam Kumalasari, 2014:21) tujuan adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut berupa kemandirian untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:54) pemberdayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan sustainable development, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis

Lingkungan startegis yang dimiliki oleh masyarakat local antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 5 tentang tujuan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Priyono (dalam Kumalasari (2014:23), dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap Inisiasi, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat masih bersifat pasif, tergantung dari apa yang diberikan oleh pihak luar.

- b. Tahap Partisipatoris, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat baru berpartisipasi terhadap kegiatan yang disusun dan direncanakan pihak luar.
- c. Tahap Emansipatoris, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan diri, oleh, dan menentukan kegiatan secara self-help untuk mereka sendiri. Pada tahap ini masyarakat aktif memikirkan, merencanakan dan menentukan kegiatan secara self-help untuk mencapai harapan yang mereka inginkan.

Sedangkan menurut Sulistiyan (dalam Kumalasari, 2014:21), tahap tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

C. *Local Economic Development (LED)*

1. *Konsep Local Economic Development (LED)*

Pembangunan dengan konsep pengoptimalan pembangunan atau komoditi unggulan daerah merupakan suatu alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berawal dari konsep *Community-Based Economic Development (CBED)*/ pembangunan ekonomi yang berdasarkan masyarakat adalah strategi pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa masyarakat sendiri memiliki hak untuk mempromosikan visi pembangunan ekonominya dan pertumbuhannya sesuai dengan spesifik budayannya, kehidupannya yang berbasiskan sumber daya dan keterbatasan kondisi ekologisnya seperti yang diungkapkan Blakely (1989: 201). Konsep CBED termuat dalam pemaparan tentang *Local Economic Development (LED)* yang dikemukakan Blakely dalam bukunya *Planning Local Economic Development* (1989).

“local government has all of the essential resources it needs to affect economic and employment outcomes. Assembling existing resources into a coherent strategy and identifying the necessary external resources such as specific finances for particural project or activity, requires that councils develop a new orientation toward their role and responsibility. Several courses of action or options are open to councils as they determine the appropriate way to respond to the unique circumstances of their locality. These are discussed next as examples of directions that council policy makers must discuss and decide upon” yang berarti

“pemerintah daerah memiliki semua sumber daya penting yang dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil ekonomi dan pekerjaan. Perakitan sumber daya yang ada menjadi strategi yang koheren dan mengidentifikasi sumber daya eksternal yang diperlukan seperti keuangan khusus untuk proyek atau kegiatan tertentu, mengharuskan dewan mengembangkan orientasi baru terhadap peran dan tanggung jawab mereka. Beberapa program tindakan atau pilihan terbuka untuk dewan karena mereka menentukan cara yang tepat untuk menanggapi situasi yang

unik dari wilayah mereka. Ini dibahas selanjutnya sebagai contoh dari arah bahwa para pembuat kebijakan dewan harus membahas dan memutuskan”. (Blakely, 1989:77)”

Konsep LED (*Local Economic Development*) menjelaskan pembangunan dengan menitik beratkan pada optimalisasi hasil dari pengelolaan potensi daerah. Tujuan tersebut dijembatani dengan pembuatan strategi yang sesuai dari pemerintah daerah. Konsep LEDberfokus pada upaya pengelolaan potensi alam di daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal sehingga pembangunan dapat dijalankan dengan optimal pula.

Konsep *Local Economic Development* (Pembangunan Sumberdaya Ekonomi Lokal (PSEL) merupakan teori yang lahir dari perkembangan *Local Economic Development* (LED). Hal ini disampaikan oleh Said (2012), sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Sumberdaya Ekonomi Lokal (LED) Secara nasional, merupakan urgensi/kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh daerah maju maupun yang relatif tertinggal.
- b. Sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan otonomi daerah, sehingga tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan ekonomi setiap daerah secara terpusat.

Sumberdaya yang dimaksud dalam pengertian tersebut meliputi Sumberdaya Alam (*Natural Resources*), dan Sumberdaya Manusia (*Human Resources*) yang merupakan komponen-komponen dari unit lahan yang pengguna secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal yang dengan keadaan ekologi tertentu akan menghasilkan produksi tertentu (FAO, 1995). Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud dalam pengertian diatas meliputi kewiraindustrian, tenaga kerja dan sumber daya institusi (HIS, 2006).

Local Economic Development (LED) menurut Said (2012), lebih menitikberatkan pada industri mengoptimalkan sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia industri, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Melihat dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan berbasis Sumberdaya dan Ekonomi Lokal (LED) adalah metode pengembangan berbasis kewilayahan yang mengindikasikan adanya peluang bagi suatu daerah untuk bisa lebih maju dengan cara mengoptimalkan potensi lokal yang ada dengan upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor penting yang ada untuk mendapatkan strategi terbaik dalam menunjang pencapaian pembangunan. Peran aktor menjadi penting mengingat mereka adalah sebagai subjek yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk merumuskan dan menjalankan strategi terbaik dalam menunjang pencapaian pembangunan.

Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal harus mengedepankan pengaruh- pengaruh dari faktor-faktor yang ada. Faktor-faktor tersebut tentu akan memberikan dampak pada upaya pemberdayaan, baik pengaruh positif maupun negatif. Faktor-faktor tersebut harus teridentifikasi dengan baik agar mampu memberikan gambaran nyata terkait objek penelitian. Selain itu, kondisi dari faktor-faktor tersebut nantinya akan menjadi bahan rujukan pembuatan kebijakan.

Produk hukum yang melandasi konsep *Local Economic Development* (LED) dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, yakni pada Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang ekonomi yang bersifat pilihan baik pertanian, perikanan,

perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata dan lain-lain, urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

D. Pembangunan Ekonomi Lokal

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Lokal

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (2005: 29) dijelaskan bahwa *Local Economic Development* (LED) adalah proses pembangunan partisipatif yang mendorong pengaturan kemitraan antara pihak berkepentingan swasta dan publik yang utama dalam wilayah yang terdefinisi, yang memungkinkan rancangan dan implementasi strategi pembangunan bersama, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global dengan tujuan akhir menciptakan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Lokal

Menurut World Bank dalam *web.world-bank.org the purpose of local economic development (LED) is to build up the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. It is a process by which public, business and non governmental sector partners work collectively to create better conditions for economic grow thand employment generation.*

Yang diartikan sebagai berikut; Secara umum pendidikan dan latihan LED ini bertujuan untuk mendorong terciptanya kebijakan, srategi, dan perencanaan yang semakin efektif dan efisien dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui meningkatkan produk unggulan, dan meningkatkan kompetensi perencana

pemerintah khususnya dalam me-mapping product unggulan. Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah: Meningkatkan kompetensi perencana pemerintah dalam me-mapping/memetakan produk unggulan, Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk lebih melibatkan para pemangku kepentingan lokal melalui perencanaan partisipatif. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan industri kecil berbasis ekonomi lokal ditinjau dari:

- a. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Peningkatan akses pemasaran
- d. Peningkatan kemitraan
- e. Peningkatan akses permodalan. (Disperindag Kabupaten Tulungagung)

A. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang IKM adalah:

Batasan Industri Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Industri Kecil** adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- b. **Industri Menengah** adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Batasan mengenai skala usaha, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Industri Kecil : 5-19 orang
- b. Industri Menengah : 20-99 orang

IKM memiliki peranan dan potensi yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Keberadaan Industri Kecil dan Menengah tentu membutuhkan

perhatian khusus oleh pemerintah terhadap perkembangannya. Diperlukan strategi dalam memberdayakannya yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha yang efektif efisien dan kondusif. Menurut Hafsah (2004: 43) menyatakan bahwa dalam pengembangan IKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melihat permasalahannya, maka diperlukan hal-hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan IKM, antara lain:

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas program tentang kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi IKM, untuk membantu meningkatkan permodalannya, baik itu melalui sector jasa financial formal, sector jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara IKM, atau antara IKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian IKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihat bagi Industri Kecil dan Menengah baik dalam aspek kewiraswataan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangan IKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh IKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara IKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Mengembangkan Kerja Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menginventarisir berbagai isu-isu muktakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Menurut pemaparan tentang penjelasan berupa upaya dalam peningkatan pengembangan IKM khususnya IKM Marmer di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung telah diimplementasikan secara seimbang oleh Pemerintah Kota, Disperindag dan Masyarakat selaku Pengerajin Marmer yang bertujuan untuk meningkatkan kesejatheraan masyarakat pengrajin dan tujuan lainnya agar produksi kerajinannya dapat diberjalan dengan lancar dari segi manajemen permodalannya hingga segi pemasaran hasil produksinya.

Dari berbagai pendapat diatas, pengertian IKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku IKM.

B. Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan industri marmer berbasis ekonomi lokal ditinjau dari:

1. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk

Peningkatan dan standarisasi dapat diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, *moral hazard* dan atau pertimbangan ekonomis. Mengingat kaitannya dengan pengawasan di pasar, sebelum penetapan pelaksanaan penetapan standarisasi produk wajib dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak serta melakukan uji kelayakan pada produk yang akan diuji. Memberikan pembinaan bagi pengolah sumber daya alam dalam menerapkan cara pengolahan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi, dan pasca penambangan kepada unit kerja Disperindag Kabupaten Tulungagung dalam rangka peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk IKM.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini mengenai bagaimana SDM tersebut dapat melaksanakan teori dan praktek yang tepat atau sesuai dengan kemampuannya. Disperindag Kabupaten Tulungagung melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap IKM seperti hal berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Jangka Pendek Berjenjang, dan berkelanjutan
 - b. Seminar
 - c. *Focus Group Discusion*
 - d. *On the job training*
 - e. Pameran
3. Peningkatan akses pemasaran

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing IKM. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh IKM.

Disperindag Kabupaten Tulungagung memberikan informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan:

- a. jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu.
- b. bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut
- c. berapa harga pasar yang berlaku
- d. selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional.

Sedangkan informasi pasar faktor produksi adalah:

- a. Sumber bahan baku yang dibutuhkan
- b. Harga bahan baku yang ingin dibeli
- c. Dimana dan Bagaimana memperoleh modal usaha
- d. Dimana mendapatkan tenaga kerja yang professional

- e. Tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja
 - f. Dimana dapat memperoleh alat-alat atau mesin yang diperlukan
4. Peningkatan kemitraan

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping IKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit IKM.
- b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping IKM sebagai *pilot project* yang bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping IKM.
- c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya.
- d. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan IKM. Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan Disperindag kabupaten Tulungagung dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna dalam rangka pengembangan IKM.

5. Peningkatan akses permodalan.

Keberhasilan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tulungagung juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam hal ini adalah Disperindag yang berafiliasi dengan Dinas Koperasi dalam mendorong penyaluran kredit kepada IKM. Berbagai skim

Kredit/pembiayaan IKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Peran pemerintah dalam skim-skim kredit IKM ini adalah pada sisi membantu dalam memberikan rekomendasi terhadap penyaluran dana kredit dan aplikasi yang akan dilakukan oleh IKM, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan IKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara IKM dengan pihak lain.

(Disperindag Kabupaten Tulungagung)

Strategi yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil Menengah menurut Hetifah Sjaifudin seperti yang dikutip oleh Fany (2009: 18) adalah sebagai berikut:

1. Strategi Kemampuan Finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi industriwan kecil menengah akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pemberdayaan industri kecil menengah melalui penyertaan modal sementara.

2. Pemberdayaan Pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang tantang sekaligus ancaman bagi industri kecil menengah. Terdapat tiga cara strategi pemasaran, yaitu meningkatkan akses industri kecil menengah kepada pasar, proteksi pasar, dan menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing.

3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar tenaga kerja melalui sistem pemagangan (*link and match*) serta pemberian inisiatif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dan pemberdayaan untuk mengembangkan SDM dan teknologi.

4. Strategi Pengaturan dan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan membantu perkembangan industri kecil menengah. Ada empat jenis perijinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan industri kecil menengah yaitu ijin tempat industri (kelayakan industri, lokasi, serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan), ijin industri serta ijin perdagangan.

5. Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan industri kecil menengah melalui:

- a. Pelibatan kepentingan industri kecil menengah dalam perencanaan kota,
- b. Proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan,
- c. Pengakuan sungguh-sungguh terhadap peran dan fungsi industri kecil

menengah bagi lingkungan masyarakat kota.

6. Fungsi Kelembagaan

Dalam hal ini institusi terkait, reorganisasi di Dinas Koperasi, Pengindustri kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri serta BAPPENAS adalah merupakan instansi yang berinisiatif untuk mengembangkan industri kecil menengah secara terpadu dan bertahap yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bidang pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan industri kecil menengah di lebur kedalam struktur vertikal (subsektor) memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pemberdayaan industri kecil menengah secara bersama-sama.

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung.

Analisis yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan model interaktif Miles dan Huberman(1992: 20). Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan IKM adalah (1) *location quotient*, (2) *diamond cluster model*, dan (3) Analisis SWOT. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Location Quotient

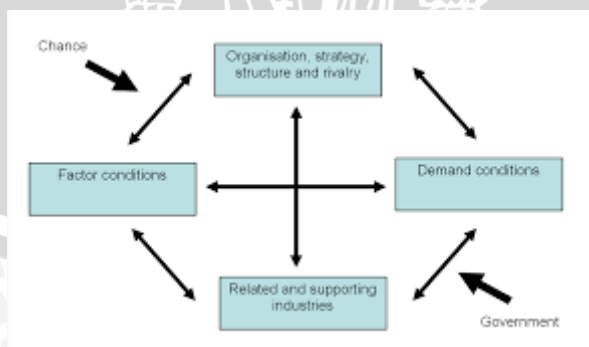
Miller dan Wright (1991), Isserman (1997), dan Hood (1998) mengemukakan bahwa metode *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan di suatu wilayah. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu

pertumbuhan. Teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan yang sama pada daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ adalah jumlah tenaga kerja, hasil produksi, atau satuan lain yang bisa digunakan sebagai kriteria.

2. *Diamond Cluster Model*

Porter (1990) mengemukakan bahwa *cluster* diartikan sebagai "*geographic concentrations of firms, suppliers, related industries, and specialized institutions that occur in a particular field in a nation, state or city.*" Definisi yang lain mengenai *clusters* adalah "*geographical concentration of industries that gain performance advantages through co-location*". *Clusters* menunjukkan hubungan antara perindustrian yang juga menyediakan *complementary service*, termasuk jasa konsultan, penyedia jasa pendidikan dan *training*, lembaga-lembaga keuangan, *professional associations* dan institusi-institusi pemerintah.

Gambar 1. *Diamond Cluster Model*



Dari *Diamond Cluster Model* seperti yang tersaji pada Gambar diatas dapat diidentifikasi terdapat 4 (empat) komponen, yaitu:

pertama, faktor input (*input factor*) yang merupakan variabel-variabel yang sudah ada dalam *cluster* industri seperti sumber daya manusia (*human resource*), sumber daya modal (*capital resource*), infrastruktur fisik (*physical infrastructure*), infrastruktur informasi (*information infrastructure*), infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific and technology infrastructure*), infrastruktur administrasi (*administrative infrastructure*), dan sumber daya alam (*natural resource*).

Kedua, kondisi permintaan (*demand condition*). Semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi.

Ketiga, industri pendukung dan terkait (*related and supporting industries*) untuk efisiensi dan sinergitas dalam *clusters*, terutama dalam hal *transaction cost*, *sharing* teknologi, informasi, dan keahlian tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perindustrian lainnya, yaitu untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

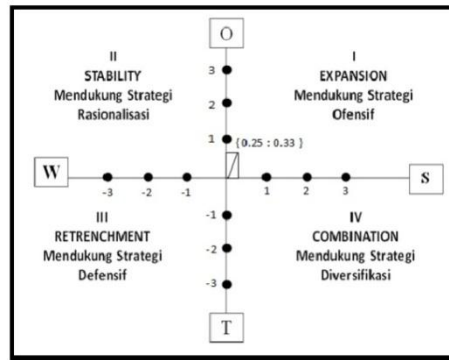
Keempat, strategi perindustrian dan pesaing (*context for firm, strategy, and rivalry*) yang dapat mendorong perindustrian untuk melakukan peningkatan kualitas produk dan inovasi. Dengan adanya persaingan yang sehat dan ketat, perindustrian akan mencari strategi yang cocok dan berupaya untuk meningkatkan efisiensi.

3. Analisis SWOT

Strategi berikutnya yang dapat digunakan dalam pemberdayaan IKM yang berada di daerah Tulungagung khususnya pada IKM marmer di Desa Besole

Tulungagung adalah SWOT Matrik:

Gambar 2. *SWOT Strategy*



Sumber: Rangkuti, 2005

Dari matriks analisis SWOT seperti yang tersaji pada Gambar, dapat diidentifikasi terdapat 4 (empat) strategi, yaitu:

Pertama, strategi SO yang merupakan strategi untuk menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Kedua, strategi WO yang merupakan strategi mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Ketiga, strategi ST yang merupakan strategi menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman.

Keempat, strategi WT yang merupakan strategi menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman.

Dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut, maka tahapan penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Menginisiasi sektor UKM unggulan yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Indeks LQ akan dijadikan pedoman untuk menginisiasi sektor unggulan IKM tersebut,

- b. Mengidentifikasi keunggulan bersaing IKM berdasarkan pendekatan *diamond cluster model*. Keunggulan bersaing ini akan mencakup faktor input, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait, dan strategi perindustrian dan pesaing,
- c. Mengklasifikasikan keunggulan bersaing IKM menjadi faktor internal dan eksternal,
- d. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*), yang selanjutnya disajikan dalam matrik SWOT,
- e. Merumuskan strategi berdasarkan kombinasi dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*),
- f. Penetapan prioritas strategi pemberdayaan IKM,
- g. Implementasi strategi terpilih

D. Teori Strategi

Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perindustrian dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam Siagian (1998: 17) strategi ialah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Strategi menurut Porter (dalam Umar, 2004: 66) adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik.

Sedangkan Thompson dan Strickland (2001: 136) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).

Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi apabila disimpulkan dari beberapa definisi di atas maka strategi IKM adalah gabungan dari kegiatan yang direncanakan dan reaksi untuk mengantisipasi persaingan dan perkembangan yang tidak terduga.

Strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perindustrian, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perindustrian dalam merumuskan strategi, yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perindustrian di masa depan dan menentukan misi perindustrian untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perindustrian dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005).

1. Tingkat-Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins yang dalam Salusu (1996:101) dijelaskan adanya empat tingkatan strategi antara lain:

a) *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berindustri untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Dalam organisasi ini bagaimana cara yang dilakukan untuk menjalankan misi mempunyai peran yang penting. Dan hal ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh

organisasi. strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan korporat atau bisnis secara keseluruhan mencakup bagaimana mengintegrasikan dan mengelola semua bisnis (New business, New Divisions, New Subsidiaries, Merger, Acquisition).

c) *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengindustri, para anggota legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategis yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya ketingkat yang lebih baik.

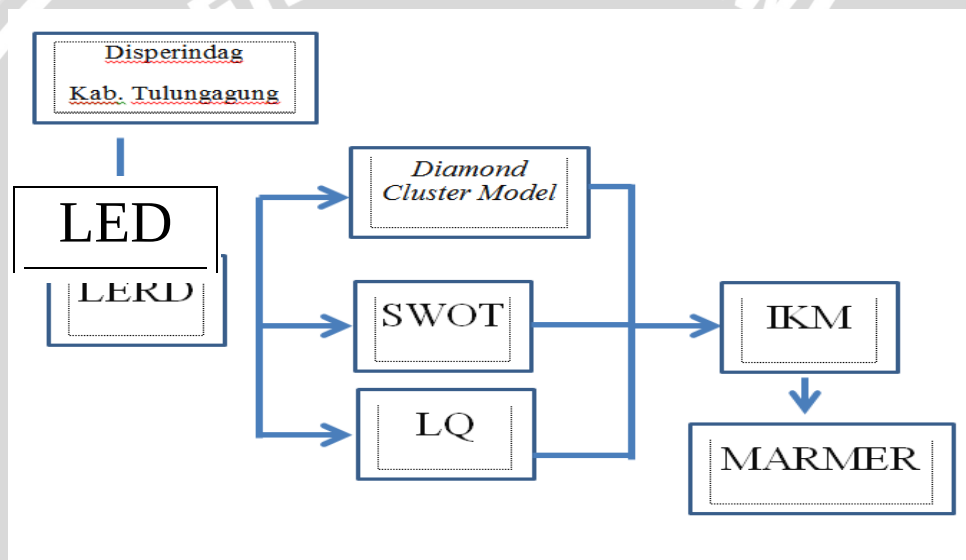
d) *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu strategi fungsional ekonomi, strategi fungsional manajemen dan strategi isu strategis. Strategi yang diformulasikan dan diimplementasikan di level fungsi manajemen dari tiap bisnis, seperti fungsi SDM, keuangan, operasional, dan pemasaran. Level ini menjadi pusat informasi manajemen strategi di level lebih atas yaitu bisnis dan korporat. Setiap unit fungsional diharuskan mengembangkan strategi bisnis agar dapat memberikan kontribusi pada kesuksesan strategi bisnis secara keseluruhan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan suatu pengertian, dimana konsep tersebut tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Notoatmodjo, 2009).

Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian



Dari kerangka berfikir diatas diketahui adanya sinergi atau keterkaitan mengenai strategi pemberdayaan IKM marmer Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan mengacu pada pemanfaatan potensi lokal berbasis *LED*.

Tabel 1. Data Perkembangan IKM Kabupaten Tulungagung

USAHA MIKRO			2008	2009	2010	2011	2012
A.	1.	Jumlah Usaha Mikro	25.223	25.878	27.202	28.561	29.132
	2.	Modal Usaha	26.453.757.739	31.423.376.197	34.201.224.876	35.911.286.119	36.629.511.841
	3.	Volume Usaha	34.621.601.420	43.182.962.062	48.628.487.355	52.032.481.469	53.073.131.098
	4.	Jumlah Karyawan	17.613	19.126	21.512	23.233	23.697
B. USAHA KECIL							
	1.	Jumlah Usaha Kecil	6.705	6.878	7.230	7.591	7.743
	2.	Modal Usaha	125.970.274.950	149.635.124.750	162.862.975.600	171.006.124.380	174.426.246.868
	3.	Volume Usaha	164.864.768.670	205.633.152.680	231.564.225.500	247.773.721.285	252.729.195.711
	4.	Jumlah Karyawan	87.569	95.632	107.563	116.168	118.491
C. USAHA MENENGAH							
	1.	Jumlah Usaha Menengah	693	727	762	798	1.369
	2.	Modal Usaha	578.653.452.600	611.653.852.750	653.250.648.500	672.848.167.955	686.305.131.314
	3.	Volume Usaha	657.895.682.100	723.869.547.500	789.653.852.960	821.240.007.078	837.664.807.220
	4.	Jumlah Karyawan	27.896	29.654	32.566	37.766	38.230

USAHA MIKRO		2008	2009	2010	2011	2012
JUMLAH TOTAL:						
1.	Jumlah UMKM	32.621	33.483	35.194	36.950	38.244
2.	Modal Usaha	731.077.485.289	792.712.353.697	850.314.848.976	879.765.578.454	897.360.890.023
3.	Volume Usaha	857.382.052.190	972.685.662.242	1.069.846.565.815	1.121.046.209.832	1.143.467.134.029
4.	Jumlah Karyawan	133.078	144.412	161.641	177.167	177.738

Sumber: Disperindag, 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara untuk melakukan suatu penelitian guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2008: 1) bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Maka dari itu dengan adanya metode penelitian sangat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Peneliti dapat memiliki pedoman dan batasan yang jelas sehingga penelitian mengenai strategi pemberdayaan IKM marmer berbasis Local Economic Development (LED). ini lebih fokus dan terarah dengan adanya metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijabarkan oleh Moloeng (2007: 11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi dan analisis mengenai strategi pemberdayaan IKM berbasis Local Economic Development (LED), berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik tulisan maupun lisan. Sumber lisan berdasarkan hasil wawancara dan sumber berupa tulisan berasal dari dokumen resmi yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong focus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah keadaan yang membingungkan akibat adanya kaitan dua fakto atau lebih. Faktor dalam hal ini berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila di tempatkan secara berkaitan akan menimbulkan persoalan atau kesulitan (Moleong,2000:237).

Fokus penelitan adalah pemilihan pokok permasalahan awal untuk di teliti dan bagaimana memfokuskannya. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus.

Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Strategi pemberdayaan IKM di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan kajian sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
 - c. Peningkatan akses pemasaran
 - d. Peningkatan kemitraan
 - e. Peningkatan akses permodalan
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari upaya pemberdayaan IKM marmer di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti:
- a. Faktor Penghambat:
 - 1) Kurangnya tenaga ahli
 - 2) Kurangnya sarana pendukung
 - 3) Kurangnya promosi
 - 4) Lamanya pengerjaan
 - b. Faktor Pendukung:
 - 1) Tata kelola usaha yang baik
 - 2) Kerjasama dengan berbagai komponen dalam memberdayakan UKM
 - 3) Iklim perdagangan yang baik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian tentang strategi pemberdayaan IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada pemberdayaan potensi local dengan dasar *Local Economic Development* (LED). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Alamat Jl. Ki

Mangunsarkoro Nomor 4 Tulungagung 66233. Telepon(0355) 321161, 321021Fax (0355) -321161

Alasan memilih Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung karena merupakan regulator dalam pemberdayaan IKM yang berada di Kabupaten Tulungagung, dimana seluruh perijinan dan pengkajian pelaksanaan IKM di Kabupaten Tulungagung diatur dan diberdayakan disana. Sebagai data pembanding, peneliti melakukan observasi di Desa Besuki kecamatan Besuki dimana mayoritas pengusaha marmer berada di Kecamatan Besuki sebagai acuan bahwa implementasi peraturan yang sudah diatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data kualitatif data dan sumber data merupakan data primer dan sekunder sedangkan sumber data bersifat objektif (Sugiyono, 2013: 307) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan.

Data ini bisa berwujud hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau catatan bulanan karyawan. Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses kebutuhan. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi tabel, grafik, diagram, dan sebagainya sehingga lebih informatif. Data sekunder ini oleh peneliti diproses lebih lanjut, misalnya catatan kegiatan pemberdayaan IKM Marmer dan hasil dari proses pemberdayaannya.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dari perusahaan berkaitan dengan keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer berupa :

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Hasil daftar pertanyaan (kuesioner) mengenai sistem penilaian terhadap Pemberdayaan IKM Marmer, serta beberapa pelaksana IKM Marmer di Desa Besuki guna mengetahui kelemahan dan kelebihan regulasi yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tulungagung sebagai implementasi pemberdayaan IKM, khususnya pada IKM Marmer. Berikutnya adalah hasil observasi kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung.

2. Data sekunder berupa :

Catatan kegiatan dan laporan unit kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sampai tahun 2016. Laporan tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan IKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Wawancara personal

Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan responden (yang diwawancarai), yang diarahkan

oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan, pewawancara biasanya telah menyiapkan rencana wawancara, sering tertulis, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan untuk menjawab masalah penelitian (Kuncoro, 2003: 139).

Wawancara personal ini dilakukan untuk memperoleh penilaian terhadap strategi pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian pelaksanaan teknis pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung serta kepada beberapa pelaku IKM marmer dengan rincian pertanyaan sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana Peningkatan kualitas dan standarisasi produk yang dilakukan Disperindag kabupaten Tulungagung terhadap pemberdayaan IKM Marmer desa Besuki.
- b. Mengetahui bagaimana Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu acuan pemberdayaan IKM Marmer desa Besuki.
- c. Mengetahui bagaimana Peningkatan akses pemasaran IKM Marmer desa Besuki.
- d. Mengetahui bagaimana Peningkatan kemitraan yang diberlakukan oleh Disperindag kabupaten Tulungagung untuk memberikan akses kerjasama dengan berbagai pihak.
- e. Mengetahui bagaimana Peningkatan akses permodalan yang diregulasi oleh Disperindag kabupaten Tulungagung guna memberikan kemudahan dalam memperoleh tambahan modal.

2. Observasi

Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (Cooper, 1996: 357):

a. Observasi non perilaku (non behavioral observation)

- 1) Analisis catatan (*record analysis*)
- 2) Analisis kondisi fisik (*physical condition analysis*)
- 3) Analisis Proses fisik (*Physical process analysis*)

b. Observasi perilaku (behavioral observation)

- 1) Analisis non verbal (*non verbal analysis*)
- 2) Analisis bahasa (*linguistic analysis*)
- 3) Analisis ekstra bahasa (*extralinguistic analysis*)
- 4) Analisis sebagian (*spatial analysis*)

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non perilaku berupa analisis catatan untuk mengetahui kondisi catatan-catatan kegiatan pemberdayaan IKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung apakah lengkap atau tidak, apakah catatan tersebut benar-benar dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi ini berasal dari sumber internal dan eksternal. Data dokumentasi yang berasal dari sumber internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi sendiri, sedangkan dokumentasi dari sumber eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi yang sedang diteliti (Cooper, 1996: 258).

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung berupa data kegiatan pemberdayaan IKM. Data berupa catatan yang diperoleh peneliti berupa perkembangan IKM di Kabupaten Tulungagung, kajian mengenai pola pemberdayaan IKM di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Disperindag dan beberapa foto hasil dokumentasi penelitian.

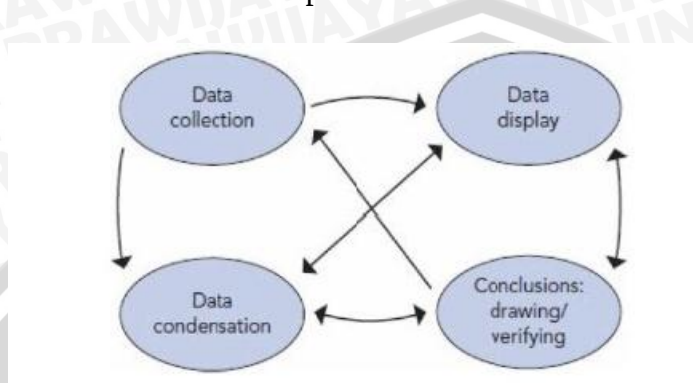
F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2007:248), analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data primer maupun sekunder. Dalam penelitian kualitatif, analisa dan penafsiran data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Sehingga penelitian kualitatif dikenal sebagai proses siklus. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 4. Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Matthew B. Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode

data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Ketiga tahapan analisis data tersebut, pada dasarnya sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit menggunakan data berupa angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menggambarkan sejumlah hasil penelitian yang mencerminkan karakteristik dari objek atau fenomena yang terjadi secara kronologis. Penyajian data hasil penelitian dalam bab ini berupa teks, tabel, gambar, grafik atau foto, disertai uraian yang memuat ulasan makna di dalamnya selanjutnya dikaji sesuai sistematika yang sudah ditentukan dan dibahas.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 tempat penelitian sebagai penyelarasan data penelitian, fokus penelitian dilakukan di Disperindak Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada kebijakan dan pemberdayaan terhadap IKM di Kecamatan Besuki dimana merupakan tempat penelitian pembanding.

a. Gambaran Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi $111^{\circ} 43'$ sampai dengan $112^{\circ} 07'$ bujur timur dan $7^{\circ} 51'$ sampai dengan $8^{\circ} 18'$ lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 Km² habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis kedalam desa/kelurahan. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.851 Rukun Warga (RW) dan 6.404 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

Sebagai unit terkecil dari pemerintahan, setiap desa mempunyai proyek pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain bidang sosial budaya, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi rakyat, sumber daya pemukiman dan teknologi tepat guna.

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen dibanding akhir tahun 2011, yaitu dari 1.043.385 jiwa menjadi 1.048.472 jiwa di tahun 2012, yang terbagi atas laki-laki 523.788 jiwa dan perempuan 524.684 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 993 jiwa/km².

b. Gambaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alamat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berada di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.4, Kepuh, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66235, Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D).

c. Gambaran Kecamatan Besuki

Kecamatan Besuki merupakan salah satu kecamatan yang ada di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung. Luas Wilayah kecamatan Besuki adalah 83,87 Km², dengan batas-batasnya yaitu:

- 1) Sebelah utara adalah Kecamatan Bandung
- 2) Sebelah timur Kecamatan Campurdarat
- 3) Sebelah selatan Samudera Indonesia, dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Besuki yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Keboireng dengan luas 29,48 Km² dan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Desa Wateskroyo dengan luas 1,55 Km². Bila di lihat dari penggunaannya sebagian besar wilayah merupakan hutan, yaitu seluas 6025, 31 Ha, sedangkan untuk sawah seluas 929 Ha. Wilayah yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 998,43 Ha. Bila di lihat dari jarak ke kantor kecamatan, desa Tulungrejo mempunyai jarak yang paling jauh yaitu 9 Km, dan kantor kecamatan berada di Desa Keboireng yang berbatasan langsung dan bersebelahan dengan kantor Desa Tanggulwelahan.

Penduduk kecamatan Besuki pada akhir tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen dibanding akhir tahun 2012, yaitu dari 36.763 jiwa menjadi 36.931 jiwa yang terbagi atas laki-laki 18.529 jiwa dan perempuan 18.402 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 440 jiwa/km². Desa dengan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Besuki yang paling tinggi adalah Desa Wateskroyo dengan tingkat kepadatan sebesar 1838 jiwa/km². Sedangkan kepadatan

terendah yaitu Desa Sedayugunung dengan tingkat kepadatan hanya 67 jiwa/km². Pasangan Usia Subur (PUS) di kecamatan ini sebanyak 7.342 pasangan, 5.475 diantaranya menggunakan alat kontrasepsi dengan rincian 420 pemakai IUD, 1.958 menggunakan pil, 2.131 menggunakan suntik, pengguna implan sebanyak 637, sedangkan yang menggunakan MOW sebanyak 247, MOP sebanyak 21 dan sisanya 61 pasangan menggunakan alat kontrasepsi kondom.

Di Kecamatan Besuki terdapat 106 industri makanan dan tembakau dengan tenaga kerja 965 orang, 36 industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya dengan tenaga kerja 67 orang, 52 industri barang dari semen dan galian non logam dengan tenaga kerja 880 serta 171 industri alat angkutan, mesin dan peralatannya dengan tenaga kerja sebanyak 402 orang. *Jiwa kewirausahaan perlu dikembangkan di masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak mencari pekerjaan tetapi menciptakan pekerjaan.* Oleh karena itu perlunya perhatian pemerintah untuk memberikan pelatihan secara gratis ke masyarakat tentang pemanfaatan potensi yang ada, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di Kecamatan Besuki terdapat penggalian oleh IKM . Produk penggalian ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga tiap tahunnya mengalami penurunan jumlah produksi. Pada tahun 2013 penggalian batu mencapai produksi 43.419 m³, turun lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2
Persebaran Industri Kecamatan Besuki

No	Jenis Industri	Unit	Tenaga Kerja
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	106	965
2	Tekstil, brng dan Alas Kaki	1	5
3	Brng Kayu & Hasil Hutan Lainnya	36	67
4	Kertas dan Barang Cetakan	0	0
5	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	0	0
6	Semen dan barang Galian non Logam	52	880
7	Logam dasar, Besi dan Baja	0	0
8	Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	171	402
9	Barang Lainnya	0	0

Sumber: Sensus Ekonomi 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

d. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan ke mana Instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen Instansi, masukan-masukan dari stakeholder dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai-nilai lingkungan yang mempengaruhi maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai Dinas yang mempunyai tugas "melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan IKM" mempunyai peran yang penting dalam pembangunan dan IKM. Guna mengimplementasikan tugas dimaksud, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung telah menetapkan VISI:

- 1) Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan dan IKM;
- 2) Meningkatkan daya saing dan IKM;
- 3) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi dan IKM;
- 4) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kesadaran berdagang.
- 5) Meningkatkan perekonomian daerah dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;
- 7) Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;

e. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memiliki adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memiliki sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan SDM aparatur dan gerakan IKM;
- 2) Meningkatkan pembinaan kepada gerakan untuk melaksanakan RAT tepat waktu;
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya dunia usaha dan pengembangan investasi;
- 4) Mengembangkan kegiatan kewirausahaan sektor pengolahan dan pemasaran hasil;

- 5) Meningkatkan penyediaan fasilitas untuk sektor dan IKM.
- 6) Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan.
- 7) Prinsip-prinsip yang dianut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, antara lain adalah
 - a) Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
 - b) Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
 - c) Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat.
 - d) Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang di dimiliki kepada masyarakat.

2. Tata kelola LED pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memberlakukan pemberdayaan terhadap industri yang terdapat di Kabupaten Tulungagung, dalam penelitian ini fokus pada pemberdayaan IKM yang terdapat di Kecamatan Besuki. Tata kelola yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

a. Tata Pemerintahan (Pemerintah Daerah)

Pemerintah daerah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu aktor penting dalam LED. Pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembangunan di daerah. Dalam konsep LED, Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berperan sebagai pelaksana LED dan mengkoordinir pembuatan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya, berperan aktif dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan Sumber Daya Manusia serta mengkoordinir pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di daerah.

b. Proses Manajemen

Proses manajemen tentu berkaitan dengan segala sesuatu yang menunjang pencapaian tujuan. Secara sederhana proses manajemen ini melibatkan input, proses dan output. Ketiganya memiliki fokus masing-masing yang harus dipahami oleh semua IKM yang berada pada lingkup pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

c. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi objek kebijakan walaupun juga tidak semua kelompok harus menerima posisi sebagai objek, ada saat saat tertentu dimana kelompok sasaran juga berperan sebagai objek sebuah kebijakan. Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah IKM kecamatan Besuki menjadi penentu kesuksesan LED, karena kelompok ini adalah pelaksana akhir dari program/kebijakan yang ada. Bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung selaku pembuat kebijakan, IKM harus memiliki pola komunikasi yang baik antar keduanya. Komunikasi ini bertujuan agar program yang dibuat kemudian proses pelaksanaan hingga evaluasi dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga setiap kali muncul permasalahan akan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.

d. Faktor Lokasi

Penentuan Lokasi dibedakan menjadi tiga, yakni :

- 1) Akses ke dan dari lokasi, akses ke infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, infrastruktur pendukung pengelolaan SDA, potensi SDA yang menjadi komoditi ekonomi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja terampil, jumlah Lembaga Keuangan Lokal.
- 2) Faktor Lokasi tidak terukur untuk dunia usaha yakni peluang kerja sama dan lembaga penelitian.
- 3) Faktor Lokasi tidak terukur individual meliputi kualitas pemukiman, lingkungan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, etos kerja SDM.

e. Kesinergisan dan Fokus Kebijakan

Keterkaitan dan Fokus kebijakan melibatkan 3 unsur, yakni :

- 1) Perluasan Ekonomi, yakni meliputi kebijakan investasi, promosi persaingan usaha, peran IKM Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, dan pengembangan keahlian.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Komunitas, meliputi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan swasta dan kebijakan pengurangan kemiskinan.
- 3) Pembangunan Wilayah, meliputi kebijakan kawasan industri, pusat pertumbuhan, pengembangan ekonomi, kerjasama antar daerah, tata ruang LED, Jaringan usaha antar sentra dan sistem industri berkelanjutan.

f. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan juga termasuk dalam kajian LED. Secara singkat, Pembangunan Berkelanjutan melibatkan 3 unsur yang meliputi Unsur Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (Disperindag, Kabupaten Tulungagung).

Pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut.
- 2) Sumber daya alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya.
- 3) Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup.
- 4) Pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih atau pilihan lain di masa depan.

- 5) Pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan dan tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula

3. Gambaran Metode Penelitian

Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan model interaktif Miles dan Huberman (1992: 20). Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan IKM adalah (1) *location quotient*, (2) *diamond cluster model*, dan (3) Analisis SWOT. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

Miller dan Wright (1991), mengemukakan bahwa metode *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan di suatu wilayah. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan memproduksi di tempat penelitian yaitu desa Besole dibandingkan dengan kemampuan produksi produk yang dapat diproduksi di seluruh wilayah kabupaten Tulungagung. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ adalah jumlah tenaga kerja, hasil produksi, atau satuan lain yang bisa digunakan sebagai kriteria.

$$LQ = \frac{\frac{Pit\ 1}{Pit}}{\frac{Pit\ 2}{Pit}}$$

Dimana :

Pit 1 = Luas areal IKM per Kecamatan (kecamatan Besuki)

PiT = Total luas areal IKM Kabupaten (kec. Besuki + Kec. Campurdarat)

Pit 2 = Luas areal IKM seluruh Kecamatan (Desa Besole)

PiT = Total luas areal IKM Kabupaten (kec. Besuki + Kec. Campurdarat)

Secara perhitungan adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{83.87 / (83.87 + 40)}{14.97 / (83.87 + 40)}$$

$$LQ = \frac{83.87 / 123.87}{14.97 / 123.87}$$

$$LQ = \frac{0.678}{0.121}$$

$$LQ = 5.60$$

Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga (3) kriteria yaitu :

- (a) $LQ > 1$; artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
- (b) $LQ = 1$; komoditas itu tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- (c) $LQ < 1$; komoditas ini juga termasuk non basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Komoditas yang menghasilkan nilai $LQ > 1$ merupakan standar normatif untuk ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Namun demikian ketika banyak komoditas di suatu wilayah yang menghasilkan $LQ > 1$, sementara yang dicari hanya satu, maka yang harus dipilih adalah komoditas yang mendapatkan nilai LQ paling tinggi. Karena nilai LQ yang semakin tinggi di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditas tersebut.

Hasil perhitungan adalah 5.60. Apabila dibandingkan dengan kriteria $LQ > 1$; artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.

Selanjutnya digunakan perhitungan dengan analisa *Diamond Cluster Model* sebagai analisa industri Kecil dan menengah ditinjau dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Penggunaan analisis ini untuk mengetahui bahwa *Diamond Cluster Model* mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, di dalam klaster juga terdapat aktor lainnya seperti pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi.

Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Perdagangan dan Industri yang mengurus IKM adalah sebagai berikut:

a. revitalisasi posisi IKM

Dalam penelitian ini, khususnya pada IKM di Kecamatan Besuki dilakukan dengan Memperbaiki akses terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal.

b. Pemberdayaan Institusional IKM dalam bentuk program:

- 1) Penyederhanaan Perizinan dan pengembangan system perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha.
- 2) Penataan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendukung pemberdayaan IKM;
Pada Pasal 3 Tujuan pembinaan dan perlindungan IKM adalah untuk: ayat 1 meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; ayat 2 memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan ekonominya; dan ayat 3 meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri.
- 3) Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan IKM;

c. Peningkatan Akses IKM terhadap Sumber-Sumber Pendanaan:

- 1) Pengembangan berbagai sistem Perkreditan untuk IKM;
 - a) Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro;
 - b) Program pendanaan komoditas IKM melalui Resi Gudang;
 - c) Kredit bagi usaha mikro dan kecil.

- 2) Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank;
 - 3) Pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah;
 - 4) Bantuan perkuatan secara selektif sektor usaha tertentu sebagai stimulant.
- d. Pengembangan Jaringan Pemasaran
- 1) Promosi proyek IKM;
 - 2) Modernisasi usaha ritel koperasi;
 - 3) Pengembangan sarana pemasaran IKM;
 - 4) Pengembangan Trading aboard dan Data Center sebagai data perdagangan.
 - 5) Pameran di dalam dan di Luar negeri.
- e. Pemberdayaan Sumberdaya IKM
- 1) Penumbuhan Wirausaha baru;
 - 2) Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi dan IKM;
 - 3) Pengembangan kualitas layanan Koperasi;
 - 4) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif;
 - 5) Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pelaku industri yang terlibat dalam industri dan onix Tulungagung:

a. Industri Inti

1) Pengrajin

Pengrajin dalam industri dan onix berperan sebagai pihak yang mengubah bahan baku batu dan onix menjadi sebuah karya seni bernilai tinggi dengan basis kreativitas.

2) IKM inti

IKM inti merupakan pelaku industri dan onix Tulungagung yang berperan sebagai perantara produk yang dihasilkan pengrajin ke distributor selanjutnya.

Tabel 3
Jumlah unit kerja dan Tenaga kerja

Desa	Unit	Tenaga
Besole	30	507
Gamping	22	373
Tanggung Gunung	15	160
Wates	20	359
Pelem	6	100

(sumber: BPS, 2014)

b. Industri pendukung

Industri pendukung merupakan industri mendukung proses produksi industri inti dalam hal penyediaan bahan baku.

- 1) Industri penyedia bahan baku batu
- 2) Industri penyedia bahan baku olahan
- 3) Industri aksesoris pelengkap

c. Pemerintah

Pemerintah merupakan institusi yang banyak berperan dalam perumusan kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan sentra. Instansi pemerintahan yang banyak berhubungan dengan sentra industri dan onix Tulungagung,

d. Institusi pendukung

Institusi ini merupakan institusi selain pemerintahan yang memiliki kontribusi terhadap keberlangsungan dan perkembangan sentra industri dan onix Tulungagung. Berikut ini adalah jenis institusi pendukung dalam sentra yaitu perbankan dan pihak perguruan tinggi.

Produk yang dijadikan penelitian merupakan jenis produk yang relatif stabil diproduksi serta memperhatikan dari segi tingkat kreativitas dan keunikan produk sebagai dasar keinginan konsumen untuk membeli. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh bahwa produk Tulungagung berpotensi untuk dikembangkan dengan melihat bahwa tingkat pertumbuhan kebutuhan *property* baik Indonesia dan luar negeri terhadap produk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Produk jenis ini mempunyai keunikan tersendiri dari segi motif, corak, warna serta bentuknya. Produk yang dijadikan amatan adalah jenis meja bundar, persegi dan orthogonal ukuran sedang (120 cm). Produk ini merupakan jenis produk yang memiliki tingkat permintaan cukup tinggi dibandingkan produk jenis lainnya

Strategi berikutnya yang dapat digunakan dalam pemberdayaan IKM yang berada di daerah Tulungagung khususnya pada IKM di kecamatan Besole Tulungagung adalah SWOT Matrik: Secara skematis, matriks *SWOT* dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. *SWOT Strategy*

Lingkungan Intern Eksternal	Kekuatan IKM (S)	Kelemahan IKM (W)
	Peluang IKM (O)	Ancaman IKM (T)
	Strategi S – O Maksi – Maksi	Strategi W – O Mini – Maksi
	Strategi S – T Maksi – Mini	Strategi W – T Mini – Mini

Sumber: Rangkuti, 2005

Tabel 5.
Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Streghths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
1. Tata kelola bersinergi dengan Sumberdaya local 2. Iklim perdagangan positif berpengaruh terhadap penjualan 3. Kontribusi terhadap perekonomian masyarakat 4. Meningkatkan devisa kabupaten Tulungagung	1. Pengembangan area promosi 2. Peluang penjualan 3. Perluasan area penjualan 4. Tatakelola produksi
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Sarana terbatas 2. Sarana pendukung kurang 3. Kurangnya promosi 4. Teknologi terbatas	1. Persaingan dengan IKM lain 2. Kurangnya dukungan pendanaan 3. Waktu produksi 4. Sumber daya

Sumber: disperindag, 2016

B. Penyajian Data Fokus penelitian

Dalam pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melalui pelaksanaan *Local Economic Development (LED)* dilaksanakan dengan dasar Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Data IKM dalam kurun waktu 2010-2015 merupakan peningkatan yang terjadi untuk mengindikasikan adanya perkembangan IKM yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Peneliti menyajikan rekap terhadap data peningkatan atau perkembangan IKM di kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 6.
Data IKM dalam kurun waktu 2010-2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah UMKM	35.194	36.950	38.244	39.009	39.049	39.042
Modal Usaha	850.314.848,976	879.765.578,454	897.360.890,023	942.228.934.524,15	946.940.049.196,77	963.658.326.649,55
Volume Usaha	1.069.846.565,815	1.121.046.209,832	1.143.467.134,029	1.012.896.104.613,46	1.651.020.350.519,93	1.689.068.693,325
Jumlah Karyawan	161.641	177.167	177.738	183.070	196.054	198.701

Sumber: Disperindag 2016

1. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis *Local Economic Development (LED)*

- a. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk yang dilakukan Disperindag kabupaten Tulungagung terhadap pemberdayaan IKM Kecamatan Besuki.

Mengenai pemberdayaan masyarakat kecamatan Besuki khususnya yang berada pada cakupan pelaku IKM mengacu pada LED, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 5 Agustus 2016 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terhadap bapak Poerwanto sebagai Kepala bagian Pelaksana pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

Dalam pemberdayaan masyarakat pelaku IKM mengacu pada aspek sosial dimana orientasi kerakyatan yang disini berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), Untuk itu, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial-budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan IKM berdasarkan LED secara berkelanjutan.

Meskipun sarana produksi memiliki “kebebasan” dalam mengeksplorasi tambang batu kapur, tetap harus ada batasan pemakaian. Pemeliharaan lingkungan berarti memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk bisa tetap memanfaatkan hasil tambang berupa batu kapur. Kemudian untuk menghasilkan pengrajin yang profesional sehingga dapat menunjang pelaksanaan kerajinan berkelanjutan perlu dilakukan pemberdayaan terhadap pengrajin untuk meningkatkan peran serta pengrajin meningkatkan kualitas pelaku IKM, dan penerapan teknologi pada pengrajin dalam mengelola sumberdaya secara maksimal.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan IKM sesuai dengan kaidah LED, seperti adanya pengendalian sosial guna penyejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar serta pemerataan kesempatan berwirausaha sehingga adanya pemerataan pendapatan, dilanjutkan dengan adanya pemberdayaan dalam memelihara lingkungan sekitar daerah penambangan batu kapur dan guna memberikan kesempatan untuk generasi berikutnya menikmati hasil tambang dan meningkatkan kualitas pelaku IKM untuk memberikan daya saing dengan produk daerah lainnya.

Dari wawancara tersebut dikuatkan oleh pelaku ikm yaitu Bapak Suhartaji pada tanggal 10 Agustus 2016 di lokasi pembuatan marmer, yang memberikan pernyataan dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

Cara mencapai tujuan dan sasaran IKM merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak Dinas dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha agar tercapai kelancaran dalam upaya mencapai sasaran sesuai tujuan Pemerintah Daerah. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan oleh Dinas dijelaskan dalam pertemuan dengan wakil pengusaha.

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melaksanakan pemberdayaan dengan melibatkan langsung pengusaha dengan memberikan kebebasan terhadap pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya dengan tetap melakukan pengawasan melalui anggota binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mengacu pada hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Disperindag Kabupaten Tulungagung mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pada pengusaha dengan tetap melakukan pengawasan melalui penyuluhan dan kegiatan tahunan seperti pameran produk IKM ataupun secara khusus memberikan pelatihan terhadap para pelaku IKM pemula melalui program “*on the job training*” sehingga keterikatan antara pada pengusaha yang sudah lama berkecimpung dalam usaha kerajinan dapat membagikan keilmuan yang dimilikinya pada calon pengusaha baru ataupun pada pengusaha pemula.

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu acuan pemberdayaan IKM Kecamatan Besuki.

Sesuai dengan wawancara yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, diketahui pelaksanaan pemberdayaan IKM dengan LED sudah sesuai dengan seharusnya dan disajikan sebagai berikut:

Selanjutnya peneliti meneliti mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melalui beberapa hasil wawancara kepada kepala bagian Pelaksana pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung bapak Poerwanto, pada tanggal 5 Agustus 2016 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, dapat diketahui dari jawaban sebagai berikut:

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Pengrajin di Kecamatan Besuki masih rendah, hal ini menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha. Keterbatasan kualitas SDM IKM berpengaruh

terhadap manajemen pengelola usaha sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. Pengrajin mengalami kesulitan dalam menginovasi produk mereka sesuai dengan permintaan pasar sehingga produk yang mereka produksi sulit untuk diterima oleh konsumen.

Dalam pemberdayaan IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melakukan beberapa metode sebagai pendekatan seperti, Metode praktis. Teknik-teknik "*on the job training*" merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. pengrajin dilatih tentang pekerjaan yang baru dengan supervisi langsung, seorang "pelatih" yang berpengalaman, hal ini dilakukan untuk memberikan pemerataan pengetahuan dan kemampuan dalam membuat hasil pengrajinan.

Pernyataan diatas dikuatkan melalui pernyataan Bapak Suhartaji sebagai pelaku ikm, pada tanggal 10 Agustus 2016 di lokasi pembuatan marmer, sebagai berikut:

Pekerja dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses produksi, terutama pada proses produksi kerajinan dengan pola tertentu salah satunya patung. Hal ini berkaitan dengan pengalaman saya menunjukkan bahwa pertumbuhan IKM bersumber dari pertumbuhan (efisiensi) yang didukung oleh pekerja yang berkualitas.

Adanya anggapan bahwa pekerja lebih penting daripada sumber daya alam. Menurut saya, kualitas pekerja lebih menentukan sehingga dapat mengurangi kelemahan hasil produksi yang didapat dari sumber daya alam (batu kapur) yang kurang bagus.

Penjelasan yang diberikan, memunculkan penyimpulan bahwa pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada pengrajin di Kecamatan Besuki dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berfokus pada pemberdayaan lokal konten yaitu dengan meningkatkan kemampuan pelaksanaan IKM dengan membagikan cara pengerjaan model, pemerintah daerah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tulungagung memberikan stimulus dengan menjadikan pengrajin yang memiliki kemampuan yang baik memberikan pembinaan kepada pengrajin yang kurang mampu dalam memproduksi kerajinan sebagai pemerataan kualitas SDM.

Secara garis besar manfaat yang didapat dari pemberdayaan SDM pelaku IKM sebagai berikut:

1) Kenaikan produktivitas.

Kenaikan produktivitas baik kualitas maupun kuantitas. Tenaga kerja dengan program latihan diharapkan akan mempunyai tingkah laku yang baru, sedemikian rupa sehingga produktivitas baik dari segi jumlah maupun mutu dapat ditingkatkan.

2) Kenaikan moral kerja.

Apabila penyelenggara latihan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada dalam organisasi IKM, maka akan tercipta suatu kerja yang harmonis dan semangat kerja yang meningkat.

3) Menurunnya pengawasan.

Semakin percaya pada kemampuan dirinya, maka dengan disadarinya kemauan dan kemampuan kerja tersebut, para pengawas tidak terlalu dibebani untuk setiap harus mengadakan pengawasan.

4) Menurunnya angka kecelakaan.

Selain menurunnya angka pengawasan, kemauan dan kemampuan tersebut lebih banyak menghindarkan para pekerja dari kesalahan dan kecelakaan.

5) Kenaikan stabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja

Stabilitas disini diartikan dalam hubungan dengan pergantian sementara karyawan yang tidak hadir atau keluar.

6) Mengembangkan pertumbuhan pribadi.

Pada dasarnya tujuan IKM mengadakan latihan adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi IKM , sekaligus untuk perkembangan atau pertumbuhan pribadi karyawan Beberapa contoh hasil produksi sebagai berikut:

Gambar 5. Hasil kerajinan IKM Kecamatan Besuki



c. Peningkatan akses pemasaran IKM Kecamatan Besuki.

Tata kelola produksi dan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu pemasaran produk di Kecamatan Besuki dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, sesuai dengan wawancara oleh kepala bagian Pelaksana pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung bapak Poerwanto, pada tanggal 5 Agustus 2016 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Pengrajin yang tersebar di beberapa desa, serta struktur IKM yang juga terbuka dominasi dan kontrol terbagi diantara mereka. Pembagian peran dalam pengembangan IKM melalui berbagai program

diharapkan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, Pembagian peran dalam pemberdayaan IKM banyak dilandasi berdasarkan hubungan kekeluargaan. Sukses juga didasari oleh kriteria yang ditentukan. Tingkat akuntabilitas pada pengrajin menjadi lebih tinggi.

Melihat keterbatasan pemberdayaan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung juga mencoba untuk melihat penerapan tata kelola yang sesuai secara lebih komprehensif. Selain itu dapat dilihat penerapan tata kelola akan secara otomatis berubah sejalan dengan berkembangnya IKM menjadi lebih besar dan profesional, untuk menjadi besar dan profesional IKM perlu untuk menerapkan tata kelola dari awal dibentuknya IKM.

Mengenai peran kelembagaan yang ada dalam proses pengembangan sumberdaya/ potensi ekonomi lokal. Kelembagaan yang dimaksud dalam konsep pengembangan sumberdaya/potensi ekonomi lokal tersebut adalah kelembagaan yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi daerah. Kelembagaan tersebut akan menindaklanjuti faktor-faktor yang akan diidentifikasi melalui LED.

Pernyataan di atas dikuatkan oleh pernyataan Bapak Suhartaji selaku pelaku ikm, 10 Agustus 2016 di lokasi pembuatan marmer sebagai berikut:

Masalah yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan IKM desa Besuki adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya pasar dan lemahnya daya saing. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan IKM desa Besuki tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami kemacetan.

Berdasarkan atas pernyataan diatas, peneliti memberikan kesimpulan pada tata kelola IKM di Kecamatan Besuki dilandasi dengan azas kekeluargaan dengan tidak memberikan penekanan atau penetrasi terlalu berlebih, karena posisi setiap

pengrajin tidak tersentralisasi pada suatu daerah tertentu maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pemberdayaan dengan menyesuaikan pola perkembangan IKM tersebut. Secara ekologis, berarti kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agro-ekosistem secara keseluruhan mulai dari manusia, tanaman dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Sumber daya lokal digunakan secara ramah dan dapat diperbaharui.

Pemberian informasi yang akurat mengenai arah pemasaran produk secara menyeluruh masih menjadi kendala, pemasaran produk pada dasarnya dikuasai oleh pelaku IKM yang sudah berkecimpung lama dan memiliki modal usaha yang cukup, dengan fakta tersebut Disperindag kabupaten Tulungagung memberikan kesempatan kepada pelaku IKM dengan kapasitas produksi rendah dan modal yang minimal untuk mengikuti bazar produk UMKM yang diadakan Dinas Perkoperasian yang bekerjasama dengan berbagai IKM dan Unsur pendukung seperti perbankan.

Sehingga dampak secara ekonomis dan dinikmati berbagai pihak yang berarti sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi dan begitu pula hak mereka dalam penggunaan bahan galian yang memadai serta bantuan teknis yang terjamin.

Secara ekonomi menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Para IKM mampu menghasilkan keuntungan dalam tingkat produksi yang cukup dan stabil, pada tingkat resiko yang masih bisa ditolelir/diterima. System ini harus

menjamin terjadinya keadilan dalam akses dan kontrol terhadap lahan, modal, informasi dan pasar bagi yang terlibat, tanpa membedakan status sosial, ekonomi.

Beberapa contoh hasil produksi sebagai berikut:

Gambar 6. Hasil kerajinan Marmer IKM Marmer Kecamatan Besuki



d. Peningkatan kemitraan yang diberlakukan oleh Disperindag kabupaten Tulungagung untuk memberikan akses kerjasama dengan berbagai pihak.

Kemitraan dalam pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung memberikan kesempatan kepada pelaku IKM untuk lebih aktif dalam melakukan pengembangan usaha, dalam pemberdayaan, peneliti mendapatkan jawaban dari kepala bagian Pelaksanaan Disperindag bapak Poerwanto pada tanggal 5 Agustus 2016 di Disperindag Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pelatihan-telatihan di BLK sesuai dengan usaha yang dilakukan, hal ini dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan atau dilakukan kolektif oleh beberapa pengusaha untuk pekerjanya. Disperindag

kecamatan Tulungagung juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai arah pemasaran dan harga produk di luar daerah untuk pelaku usaha pemula serta memberikan kesempatan pihak ketiga untuk melakukan penelitian mengenai keberlangsungan IKM di Kabupaten Tulungagung.

Secara kajian, jawaban dari Kabag Pelaksana Teknis Disperindag Kabupaten Tulungagung mengacu pada teori pemberdayaan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suhartaji, guna mengetahui implementasi dari regulasi yang diberlakukan Disperindag Kabupaten Tulungagung pada 10 Agustus 2016 di lokasi pembuatan marmer.

Pelaku IKM jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan, karena pelaksanaan usaha di Kecamatan Besuki dilakukan secara bersama-sama dengan saling memberikan bantuan berupa cara membuat sebuah produk, yang lebih berpengalaman membagikan teknik pemahatan kepada pelaku usaha yang kurang bisa.

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan IKM di Kabupaten Tulungagung sebagaimana uraian di atas, maka diperlukan strategi pada tatanan makro, dan mikro melalui implementasi program-program pemberdayaan IKM. Pemberdayaan IKM mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penciptaan iklim usaha UMKM. Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha kecil menengah.
- 2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka

dan potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi.

- 3) Penegembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat;
 - 4) Pemberdayaan Usaha Skala Kecil. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri
 - 5) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat.
- e. Peningkatan akses permodalan yang diregulasi oleh Disperindag kabupaten Tulungagung guna memberikan kemudahan dalam memperoleh tambahan modal.

Hasil dari wawancara dengan kepala bagian Pelaksanaan Disperindag Kabupaten Tulungagung bapak Poerwanto pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagai berikut:

Peran pemerintah dalam memberikan kemudahan pelaku IKM dengan memberikan skim-skim kredit IKM pada sisi membantu dalam memberikan rekomendasi terhadap penyaluran Dana kredit dan aplikasi yang Akan dilakukan oleh IKM, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank

yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan IKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara IKM dengan pihak lain.

Dari jawaban tersebut, pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Disperindag kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pembiayaan adalah dengan memberikan rekomendasi kepada IKM untuk melakukan aplikasi kredit kepada lembaga keuangan yang berada di sekitar Desa Besuki ataupun berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Fakta yang terdapat di Kecamatan Besuki dari hasil wawancara dari Bapak Suhartaji pada tanggal 10 Agustus 2016 di lokasi pembuatan marmer adalah sebagai berikut:

Apabila terdapat kekurangan modal dalam produksi, pengrajin meminta bantuan kepada ketua (kelompok kerja) untuk melakukan permohonan kredit pada koperasi. Jadi bukan diberikan langsung kepada pengrajin untuk kelangsungan usaha, akan tetapi pemberlakuan kredit diberikan kepada pengrajin apabila terdapat pesanan dan harus melampirkan surat perjanjian atau tanda terima.

Modal produksi yang dimiliki oleh pengrajin sangat beragam, begitu pula pesanan yang didapatkan dari konsumen. Karena keberagaman model, harga, kualitas dan bentuk, kesempatan mendapatkan pesanan bisa didapatkan oleh siapa saja. Hal ini menjadi ironi apabila pengrajin kecil mendapatkan pesanan yang banyak, sehingga membutuhkan tambahan modal. Modal dapat diajukan sesuai dengan jumlah pesanan yang didapatkan bukan pada pemerataan pemberian modal kepada pengrajin untuk menjalankan usahanya.

1. Analisis yang digunakan dalam Penelitian

Berdasarkan analisis *Klassen Typologi* dan LQ dapat diketahui sektor mana yang perlu diprioritaskan oleh Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka kita juga dapat melihat dari segi sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian dalam hal ini berkaitan dengan IKM wilayah Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya pemerataan penyebaran sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Tulungagung, dapat di analisis dengan metode *skalogram* yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan IKM wilayah Kabupaten Tulungagung.

Analisis dengan metode *skalogram* dapat dilihat daerah mana yang belum lengkap sarana dan prasarana dalam pembangunan wilayahnya untuk meningkatnya perekonomian Kabupaten Tulungagung yang adil dan merata, dari analisis *skalogram* kita juga dapat melihat perkembangan pemberdayaan IKM wilayah Tulungagung, tidak dari segi ekonominya saja yang di analisis dengan *Klassen Typologi* dan *Location Quotient* (LQ), tetapi kita juga bisa melihat perkembangan sarana dan prasarana wilayah yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan IKM Wilayah Kabupaten Tulungagung. Dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut, maka tahapan penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Secara perhitungan adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{83.87/123.57}{14.97/123.57}$$

$$LQ = \frac{0.678}{0.121}$$

$$LQ = 5.60$$

Hasil perhitungan adalah 5.60. Apabila dibandingkan dengan kriteria $LQ > 1$; artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Selanjutnya digunakan perhitungan dengan analisa *Diamond Cluster Model* sebagai analisa industri Kecil dan menengah dengan pemerintah kabupaten ditinjau dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung.

Pelaku sistem ada dua jenis yaitu pelaku inti dan pendukung. Pelaku inti merupakan yang berhubungan dengan proses produksi dan distribusi sedangkan pendukung adalah pelaku yang membuat kebijakan diluar sistem industri dan onix seperti koperasi, perbankan dan pemerintah. Fokus penelitian ini terdiri atas kelompok pengrajin, IKM, dan Pemerintah.

Pengrajin dalam industri dan onix berperan sebagai pihak yang mengubah bahan baku batu dan onix menjadi sebuah karya seni bernilai tinggi dengan basis kreativitas. IKM inti merupakan pelaku industri dan onix Tulungagung yang berperan sebagai perantara produk yang dihasilkan pengrajin ke distributor selanjutnya. Pemerintah institusi yang banyak berperan dalam perumusan kebijakan dapat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan sentra. Instansi pemerintahan banyak berhubungan dengan industri dan onix Tulungagung.

Sektor IKM yang diteliti menggunakan metode *LQ* diklasifikasikan ke dalam

dua golongan utama yaitu: sektor basis dan sektor non basis, dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses perekonomian tersebut akan menyebabkan mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. IKM dengan kategori sektor basis akan menghasilkan produk untuk pasar domestik daerah itu maupun pasar luar daerahnya, sehingga perkembangannya diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung, sedangkan IKM dengan kategori sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan ekonominya hanya melayani pasar daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor ekonomi daerahnya belum berkembang.

Dari *Diamond Cluster Model* seperti yang tersaji dapat diidentifikasi terdapat 4 (empat) komponen, yaitu:

pertama, faktor input (*input factor*) yang merupakan variabel-variabel yang sudah ada dalam *cluster* industri seperti sumber daya manusia (*human resource*), sumber daya modal (*capital resource*), infrastruktur fisik (*physical infrastructure*), infrastruktur informasi (*information infrastructure*), infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific and technology infrastructure*), infrastruktur administrasi (*administrative infrastructure*), dan sumber daya alam (*natural resource*).

Kedua, kondisi permintaan (*demand condition*). Semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi. Berikut ini penggambaran aspek-aspeknya secara garis besar:

a. Aspek Pemasaran

Pemasaran dalam hal ini lebih terkait dengan bagaimana bentuk promosi

yang dilakukan oleh IKM untuk meningkatkan potensial konsumen dalam membeli produk.

b. Aspek Kualitas

Kualitas merupakan salah satu parameter yang diperhitungkan dalam keputusan konsumen untuk membeli produk. Perbaikan kualitas produk diimbangi dengan peningkatan *cost*.

c. Aspek Kreativitas

Untuk beberapa jenis produk tertentu motif atau desain menjadi salah satu alasan untuk membeli produk. Semakin berjalan waktu aspek desain berubah-ubah atau biasa disebut *trend*.

d. Aspek Pertimbangan Harga.

Persepsi harga yang dianggap sesuai oleh konsumen merupakan hal yang perlu dikaji bagi produsen untuk menentukan harga jual mereka

e. Aspek Teknologi

Teknologi merupakan penggerak produksi dalam IKM . Semakin baik dari segi kreativitas dan kualitas maka produk akan lama berada di pasaran dan daur hidup lebih panjang tahapan kedewasaannya.

f. Aspek Finansial

Kemampuan investasi didapatkan ketika tingkat laba yang didapatkan IKM juga meningkat.

Ketiga, industri pendukung dan terkait (*related and supporting industries*) untuk efisiensi dan sinergitas dalam *clusters*, terutama dalam hal *transaction cost*,

sharing teknologi, informasi, dan keahlian tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perindustrian lainnya, yaitu untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Berikut ini penjelasan singkat tentang kontribusi Pemerintah dan institusi pendukung terkait dengan industri dan onix Tulungagung:

a. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur serta pemerintah daerah dalam ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kontribusi pemerintah terhadap sentra industri industri dan onix Tulungagung adalah keuangan, teknologi dan pembinaan.

b. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan banyak memberikan kontribusi dalam hal keuangan khususnya permodalan usaha. Namun, besarnya kontribusi dari lembaga keuangan dipengaruhi oleh kebijakan kredit IKM yang diberikan oleh pemerintah.

c. Perguruan Tinggi

Kontribusi perguruan tinggi diberikan dalam bentuk melakukan penelitian yang bermanfaat khususnya dalam bidang teknologi dan mensosialisasikannya terhadap industri terkait, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dan kualitas produk yang dihasilkan.

Keempat, strategi perindustrian dan pesaing (*context for firm, strategy, and rivalry*) yang dapat mendorong perindustrian untuk melakukan peningkatan kualitas produk dan inovasi. Dengan adanya persaingan yang sehat dan ketat, perindustrian akan mencari strategi yang cocok dan berupaya untuk meningkatkan efisiensi.

Kondisi permintaan (*demand condition*). Semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi. Berikut ini penggambaran aspek-aspeknya secara garis besar: Pemasaran dalam hal ini lebih terkait dengan bagaimana bentuk promosi yang dilakukan oleh IKM untuk meningkatkan potensial konsumen dalam membeli produk. Kualitas merupakan salah satu parameter yang diperhitungkan dalam keputusan konsumen untuk membeli produk. Perbaikan kualitas produk diimbangi dengan peningkatan *cost*. Untuk beberapa jenis produk tertentu motif atau desain menjadi salah satu alasan untuk membeli produk. Semakin berjalan waktu aspek desain berubah-ubah atau biasa disebut *trend*.

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur serta pemerintah daerah dalam ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kontribusi pemerintah terhadap sentra industri industri dan onix Tulungagung adalah keuangan, teknologi dan pembinaan. Lembaga keuangan banyak memberikan kontribusi dalam hal keuangan khususnya permodalan usaha. Namun, besarnya kontribusi dari lembaga keuangan dipengaruhi oleh kebijakan kredit IKM yang diberikan oleh pemerintah.

Produk yang dijadikan penelitian merupakan jenis produk yang relatif stabil diproduksi serta memperhatikan dari segi tingkat kreativitas dan keunikan produk sebagai dasar keinginan konsumen untuk membeli. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh bahwa produk Tulungagung berpotensi untuk dikembangkan

dengan melihat bahwa tingkat pertumbuhan kebutuhan *property* baik Indonesia dan luar negeri terhadap produk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Produk jenis ini mempunyai keunikan tersendiri dari segi motif, corak, warna serta bentuknya. Produk yang dijadikan amatan adalah jenis meja bundar, persegi dan orthogonal ukuran sedang (120 cm). Produk ini merupakan jenis produk yang memiliki tingkat permintaan cukup tinggi dibandingkan produk jenis lainnya.

2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tulungagung berbasis *Local Economic Development (LED)*

a. Faktor pendukung pemberdayaan IKM berbasis LED

- 1) Tata Kelola atau budaya kerja IKM yang baik, dimana dalam pelaksanaan produksi tetap mengacu pada pemanfaatan sumberdaya lokal, dan bersinergi dengan dinas yang terkait. Dorongan dan bantuan tata kelola produksi yang dilakukan oleh Disperindak Kabupaten Tulungagung secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir pelaku IKM dan mendorong calon konsumen nantinya mempercayakan menggunakan hasil olahan tambang khususnya sebagai komoditas.
- 2) Iklim perdagangan Positif dan semangat kerja tinggi, permintaan terhadap produk tidak hanya berupa hiasan atau souvenir akan tetapi juga berupa barang kebutuhan seperti meja dan porselin. Kontribusi Positif terhadap masyarakat dan kelestarian Lingkungan, dengan pemanfaatan sumberdaya lokal baik sumberdaya Manusia ataupun bahan tambang yang digunakan dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitar produksi.

- 3) Melakukan Kerjasama, dalam menciptakan suatu peluang untuk mewujudkan dukungan atas perkembangan produk dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Potensi pemasaran yang cukup luas karena produk yang ditawarkan tidak hanya barang hiasan akan tetapi meja dan porselin.

b. Faktor Penghambat pemberdayaan IKM berbasis LED

- 1) Tenaga ahli yang terbatas, dimana SDM (Sumber Daya Manusia) atau tenaga ahli di bidang masih memerlukan pelatihan tambahan dari Disperindak Kabupaten Tulungagung untuk mencetak tenaga yang kompeten. Teknologi yang masih terbatas, aspek teknologi yang kurang kompetitif menjadikan kendala tersendiri dalam hal pelayanan kepada konsumen.
- 2) Kurangnya sarana pendukung, beberapa sarana penting yang masih sering meninggalkan kesan dan keluhan bagi setiap konsumen yang memesan produk . Kurangnya aturan pendukung, kurangnya peraturan yang mendukung setiap kegiatan operasional maupun pemasaran produk dan jasa yang dimiliki.
- 3) Promosi atau pengenalan untuk meningkatkan sosialisasi berkaitan dengan pengenalan pada produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan menggunakan bazar produk UMKM. Dengan cara ini memungkinkan tenaga pemasaran yang dibutuhkan banyak, sehingga cara ini masih kurang efisien dan efektif.
- 4) Produksi yang membutuhkan waktu lebih, memungkinkan untuk mengurangi daya saing terhadap produk sejenis. Sumber Daya yang kurang

mengurangi kualitas hasil produksi . Persaingan yang terjadi dengan IKM lain yang bergerak di bidang furniture sehingga persaingan harga akan semakin ketat, terlebih adanya hasil produksi meubel dengan harga terjangkau.

Kekuatan (*Streghts*) pada IKM yang di berdayakan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung adalah Tata kelola bersinergi dengan Sumberdaya local, Iklim perdagangan positif berpengaruh terhadap penjualan, Kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, Meningkatkan devisa kabupaten Tulungagung. Peluang (*Opportunities*) didapat dari Pengembangan area promosi, Peluang penjualan, Perluasan area penjualan, Tatakelola produksi. Kelemahan (*Weaknesses*) Sarana terbatas, Sarana pendukung kurang, Kurangnya promosi, Teknologi terbatas. Ancaman (*Threats*) Persaingan dengan IKM lain, Kurangnya dukungan pendanaan, Waktu produksi dan Sumber daya

Strategi yang tepat adalah *Enterprise Strategy* dimana Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berindustri untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masa depan dan menentukan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

Dari matriks analisis SWOT seperti yang tersaji pada Tabel 4 dapat diidentifikasi terdapat 4 (empat) strategi, yaitu:

Pertama, strategi S-O yang merupakan strategi untuk menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam penelitian ini pelaksanaan Strategi S-O dirumuskan dengan pertimbangan bahwa Disperindak kabupaten Tulungagung hendak memanfaatkan kekuatan IKM dan keunggulan bersaing yang dimiliki untuk mengeksplotasi peluang IKM yang tersedia. Strategi ini bersifat agresif, memacu pertumbuhan IKM. Oleh karena itu strategi ini juga disebut maksi-maksi karena Disperindak kabupaten Tulungagung mencoba menggunakan apa yang serba positif (maksimal) yang kini dimiliki. Disperindak kabupaten

Tulungagung tentu saja menyukai jika memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan strategi ini karena IKM sedang sehat dan di saat yang sama tersedia peluang IKM yang menjanjikan.

Kedua, strategi WO yang merupakan strategi mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO diperoleh ketika Disperindak kabupaten Tulungagung mencoba memanfaatkan peluang IKM yang tersedia untuk mengurangi bahkan mengeliminasi kelemahan IKM yang ada. Strategi ini disebut mini-maksi karena yang maksimal hanya satu variable, yakni peluang; sedangkan satu variable lainnya dinilai sebagai sesuatu yang minimal karena hanya berupa kelemahan. Strategi ini tidak seagresif yang disebut pertama, karena Disperindak kabupaten Tulungagung tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan peluang IKM yang tersedia. Ia lebih berkonsentrasi untuk menyehatkan IKM dengan cara mengeliminir kelemahan yang dimiliki atau outsourcing. Jika terpaksa Disperindak kabupaten Tulungagung dapat membiarkan peluang IKM yang tersedia untuk diambil oleh IKM pesaingnya.

Ketiga, strategi ST yang merupakan strategi menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman. Strategi ST serupa dengan strategi WO karena variable yang ada tidak maksimal. Strategi ST lahir dari analisis Disperindag kabupaten Tulungagung yang hendak menggunakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk menghindari efek negatif dari ancaman IKM yang dihadapi. Strategi ini disebut maksi-mini karena hanya memiliki satu variable maksimal, yakni kekuatan. Variabel yang lain bersifat minimal, yakni ancaman IKM. IKM memiliki

keunggulan akan tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal karena yang tersedia hanya ancaman IKM . Ancaman IKM tersebut dapat menjadi sebab ketidaksehatan IKM jika Disperindak kabupaten Tulungagung jika Disperindak kabupaten Tulungagung keliru dalam mengantisipasinya.

Keempat, strategi WT yang merupakan strategi menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman. Strategi WT pada dasarnya lebih merupakan strategi bertahan yakni strategi IKM yang masih mungkin ditemukan dan dipilih dengan meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman IKM . Karena sifatnya yang pasif dan tidak kedua variable yang ada bersifat minimal, strategi WT disebut juga strategi mini-mini. Disperindak kabupaten Tulungagung tentu saja tidak hendak meletakkan strategi ini pada pilihan pertama.

Strategi ini hanya amat sedikit memberikan ruang gerak bagi Disperindag kabupaten Tulungagung. IKM telah sampai pada soal mati atau hidup (*survival*), bahkan mungkin harus memilih untuk melakukan likuidasi.

a. Faktor Internal (IFAS)

1) Kekuatan (Strengths)

- (a) Tata Kelola atau budaya kerja IKM yang baik, dimana dalam pelaksanaan produksi tetap mengacu pada pemanfaatan sumberdaya lokal, dan bersinergi dengan dinas yang terkait
- (b) Iklim perdagangan Positif dan semangat kerja tinggi, permintaan terhadap produk tidak hanya berupa hiasan atau souvenir akan tetapi juga berupa barang kebutuhan seperti meja dan porselin.

- (c) Kontribusi Positif terhadap masyarakat dan kelestarian Lingkungan, dengan pemanfaatan sumberdaya lokal baik sumberdaya Manusia ataupun bahan tambang yang digunakan dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitar produksi.
- (d) Membantu meningkatkan devisa Kabupaten Tulungagung dengan share terhadap pertumbuhan sektor ril.

2) Kelemahan (*Weaknesses*)

- (a) Tenaga ahli yang terbatas, dimana SDM (Sumber Daya Manusia) atau tenaga ahli di bidang masih memerlukan pelatihan tambahan dari Disperindak Kabupaten Tulungagung untuk mencetak tenaga yang kompeten.
- (b) Kurangnya sarana pendukung, beberapa sarana penting yang masih sering meninggalkan kesan dan keluhan bagi setiap konsumen yang memesan produk .
- (c) Kurangnya aturan pendukung, kurangnya peraturan yang mendukung setiap kegiatan operasional maupun pemasaran produk dan jasa yang dimiliki.
- (d) Promosi atau pengenalan untuk meningkatkan sosialisasi berkaitan dengan pengenalan pada produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan menggunakan bazar produk UMKM. Dengan cara ini memungkinkan tenaga pemasaran yang dibutuhkan banyak, sehingga cara ini masih kurang efisien dan efektif.

- (e) Teknologi yang masih terbatas, aspek teknologi yang kurang kompetitif menjadikan kendala tersendiri dalam hal pelayanan kepada konsumen.

b. Faktor Eksternal (EFAS)

1) Peluang (*Opportunities*)

- (a) Dengan diadakannya bazar dan pengembangan area promosi yang dilakukan oleh Disperindak Kabupaten Tulungagung memberikan peluang untuk memasarkan produk tidak hanya di area kabupaten akan tetapi dapat mencakup area regional
- (b) Melakukan Kerjasama, dalam menciptakan suatu peluang untuk mewujudkan dukungan atas perkembangan produk dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.
- (c) Potensi pemasaran yang cukup luas karena produk yang ditawarkan tidak hanya barang hiasan akan tetapi meja dan porselin.
- (d) Dorongan dan bantuan tata kelola produksi yang dilakukan oleh Disperindak Kabupaten Tulungagung secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir pelaku IKM dan mendorong calon konsumen nantinya mempercayakan menggunakan hasil olahan tambang khususnya sebagai komoditas.

2) Ancaman (*Threats*)

- (a) Persaingan yang terjadi dengan IKM lain yang bergerak di bidang furniture sehingga persaingan harga akan semakin ketat, terlebih adanya hasil produksi meubel dengan harga terjangkau.
- (b) Kurangnya dukungan terhadap pencarian dana guna menambah daya

produksi yang didapat dari lembaga keuangan

- (c) Produksi yang membutuhkan waktu lebih, memungkinkan untuk mengurangi daya saing terhadap produk sejenis
- (d) Sumber Daya yang kurang mengurangi kualitas hasil produksi .

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis *Local Economic Development (LED)*

Dengan memberikan pemberdayaan di berbagai bidang. Menurut World Bank (dalam Mardikanto dan Soebito, 2012: 27) pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu konsep, metode, produk dan tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian.

Dalam pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melalui pelaksanaan *Local Economic Development (LED)* dilaksanakan dengan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca

tambang”. Penerimaan masyarakat kecamatan Besuki khususnya yang berada pada cakupan pelaku IKM sesuai dengan kaidah LED, seperti adanya pengendalian sosial guna penyejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar serta pemerataan kesempatan berwirausaha sehingga adanya pemerataan pendapatan, dilanjutkan dengan adanya pemberdayaan dalam memelihara lingkungan sekitar daerah penambangan batu kapur dan guna memberikan kesempatan untuk generasi berikutnya menikmati hasil tambang dan meningkatkan kualitas pelaku IKM untuk memberikan daya saing dengan produk daerah lainnya. Mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melalui beberapa cara, memunculkan penyimpulan bahwa pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada pengrajin di Kecamatan Besuki dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berfokus pada pemberdayaan lokal konten yaitu dengan meningkatkan kemampuan pelaksanaan IKM dengan membagikan cara pengerjaan model, pemerintah daerah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memberikan stimulus dengan menjadikan pengrajin yang memiliki kemampuan yang baik memberikan pembinaan kepada pengrajin yang kurang mampu dalam memproduksi kerajinan sebagai pemerataan kualitas SDM.

Dari hal tersebut, diketahui Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur serta pemerintah daerah dalam ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kontribusi pemerintah terhadap sentra industri industri dan onix Tulungagung adalah keuangan, teknologi dan pembinaan. Lembaga keuangan banyak memberikan kontribusi dalam hal keuangan khususnya permodalan usaha.

Namun, besarnya kontribusi dari lembaga keuangan dipengaruhi oleh kebijakan kredit IKM yang diberikan oleh pemerintah.

tahap tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Disperindak dan dinas perijinan Penyederhanaan Perizinan dan pengembangan system perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha; Penataan Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendukung pemberdayaan IKM; Pada Pasal 3 Tujuan pembinaan dan perlindungan IKM adalah untuk: ayat 1 meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil

budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; ayat 2 memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan ekonominya; dan ayat 3 meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan IKM;

2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Tulungagung berbasis *Local Economic Development (LED)*

Industri pendukung merupakan industri mendukung proses produksi industri inti dalam hal penyediaan bahan baku.

- a. Industri penyedia bahan baku batu
- b. Industri penyedia bahan baku olahan
- c. Industri aksesoris pelengkap

Pemerintah merupakan institusi yang banyak berperan dalam perumusan kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan sentra. Instansi pemerintahan yang banyak berhubungan dengan sentra industri dan onix Tulungagung, Institusi ini merupakan institusi selain pemerintahan yang memiliki kontribusi terhadap keberlangsungan dan perkembangan sentra industri dan onix Tulungagung. Berikut ini adalah jenis institusi pendukung dalam sentra yaitu

perbankan dan pihak perguruan tinggi.

a. Faktor pendukung pemberdayaan IKM berbasis LED

- 1) Tata Kelola atau budaya kerja IKM yang baik, dimana dalam pelaksanaan produksi tetap mengacu pada pemanfaatan sumberdaya lokal, dan bersinergi dengan dinas yang terkait. Dorongan dan bantuan tata kelola produksi yang dilakukan oleh Disperindak Kabupaten Tulungagung secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir pelaku IKM dan mendorong calon konsumen nantinya mempercayakan menggunakan hasil olahan tambang khususnya sebagai komoditas.
- 2) Iklim perdagangan Positif dan semangat kerja tinggi, permintaan terhadap produk tidak hanya berupa hiasan atau souvenir akan tetapi juga berupa barang kebutuhan seperti meja dan porselin. Kontribusi Positif terhadap masyarakat dan kelestarian Lingkungan, dengan pemanfaatan sumberdaya lokal baik sumberdaya Manusia ataupun bahan tambang yang digunakan dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitar produksi.
- 3) Melakukan Kerjasama, dalam menciptakan suatu peluang untuk mewujudkan dukungan atas perkembangan produk dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Potensi pemasaran yang cukup luas karena produk yang ditawarkan tidak hanya barang hiasan akan tetapi meja dan porselin.

b. Faktor Penghambat pemberdayaan IKM berbasis LED

- 1) Tenaga ahli yang terbatas, dimana SDM (Sumber Daya Manusia) atau tenaga ahli di bidang masih memerlukan pelatihan tambahan dari Disperindak Kabupaten Tulungagung untuk mencetak tenaga yang kompeten. Teknologi yang masih terbatas, aspek teknologi yang kurang kompetitif menjadikan

kendala tersendiri dalam hal pelayanan kepada konsumen.

- 2) Kurangnya sarana pendukung, beberapa sarana penting yang masih sering meninggalkan kesan dan keluhan bagi setiap konsumen yang memesan produk . Kurangnya aturan pendukung, kurangnya peraturan yang mendukung setiap kegiatan operasional maupun pemasaran produk dan jasa yang dimiliki.
- 3) Promosi atau pengenalan untuk meningkatkan sosialisasi berkaitan dengan pengenalan pada produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan menggunakan bazar produk UMKM. Dengan cara ini memungkinkan tenaga pemasaran yang dibutuhkan banyak, sehingga cara ini masih kurang efisien dan efektif.
- 4) Produksi yang membutuhkan waktu lebih, memungkinkan untuk mengurangi daya saing terhadap produk sejenis. Sumber Daya yang kurang mengurangi kualitas hasil produksi . Persaingan yang terjadi dengan IKM lain yang bergerak di bidang furniture sehingga persaingan harga akan semakin ketat, terlebih adanya hasil produksi meubel dengan harga terjangkau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan 2 tempat penelitian sebagai penyelarasan data penelitian, fokus penelitian dilakukan di Disperindag Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada kebijakan dan pemberdayaan terhadap IKM Marmer di Kecamatan Besuki dimana merupakan tempat penelitian pembanding.

1. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis *Local Economic Development (LED)*

- a. Peningkatan kualitas dan standarisasi produk yang dilakukan Disperindag Kabupaten Tulungagung terhadap pemberdayaan IKM Kecamatan Besuki.

Pengawasan dan Pelatihan memiliki peran penting dalam menentukan strategi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaku IKM untuk lebih mengembangkan usahanya. Hal ini terbukti saat Disperindag melakukan pengawasan melalui penyuluhan dan mengadakan kegiatan Tahunan yang salah satunya yaitu pameran produk IKM marmer, otomatis para pengusaha IKM akan lebih mengetahui kualitas dan model yang saat ini banyak di butuhkan konsumen. Jadi pengusaha IKM lebih terbantu apalagi didukung

dengan adanya pelatihan yang juga diadakan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung.

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu acuan pemberdayaan IKM Kecamatan Besuki.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan tetapi Kualitas SDM pengrajin di Kecamatan Besuki masih tergolong rendah, hal ini menjadi salah satu factor penghambat dalam pengembangan usaha di Kecamatan Besuki. Maka dari itu sangatlah penting di adakannya pelatihan dari pemerintah setempat yaitu Disperindag Kabupaten Tulungagung demi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengolahan marmer. Selain pelatihan, para pengusaha marmer juga mengadakan kelompok belajar seperti pengusaha senior memberikan pengetahuan, cara pemahatan, dan model terbaru terhadap pengusaha yang masih junior, hal ini juga masih dalam pengawasan Disperindag demi terciptanya pemeratan SDM.

- c. Peningkatan akses pemasaran IKM Marmer desa Besuki. Masih kurangnya informasi pemasaran produk marmer oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Upaya ini harus di tingkatkan agar pelaku IKM tidak khawatir dengan arah pemasaran produk mereka.

- d. Peningkatan kemitraan yang diberlakukan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung untuk memberikan akses kerjasama dengan berbagai pihak.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menjalin program kemitraan antara dinas terkait seperti Diskoperindag sebagai perantara modal, pengrajin atau IKM sebagai pihak yang memanfaatkan potensi daerahnya salah satunya yaitu marmer dengan cara mengolah untuk dijadikan barang sesuai kebutuhan konsumen, dan perbankan sebagai penyaluran dana kredit kepada IKM. Dengan program kemitraan tersebut dapat membantu mendorong peningkatan produk ekspor local.

- e. Peningkatan akses permodalan yang diregulasi oleh Disperindag kabupaten Tulungagung guna memberikan kemudahan dalam memperoleh tambahan modal.

Dalam membentuk suatu IKM, selain kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, hal terpenting lainnya adalah modal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha. Hal ini sering kali menjadi kendala. Sulitnya mendapatkan modal akan menghambat perkembangan suatu IKM apalagi pelaku IKM yang belum mengerti cara mengajukan pinjaman. Maka dari itu Disperindag Kabupaten Tulungagung membantu dalam memberikan rekomendasi terhadap penyaluran dana kredit kepada ikm, dan memberikan sosialisasi tentang tata cara mengajukan pinjaman.

2. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Marmer di Kabupaten Tulungagung berbasis *Local Economic Development (LED)*

a. Faktor pendukung pemberdayaan IKM berbasis LED di Kabupaten Tulungagung, yakni:

- 1) Tata Kelola atau budaya kerja IKM Marmer yang baik, dimana dalam pelaksanaan produksi tetap mengacu pada pemanfaatan sumberdaya lokal, dan bersinergi dengan dinas yang terkait. Budaya kerja yang baik juga akan menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab yang besar dalam diri pengusaha IKM sehingga mampu memotivasi untuk menampilkan kinerja yang paling memuaskan, mencapai tujuan yang lebih baik, dan pada gilirannya akan memotivasi seluruh anggotanya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.
- 2) Iklim perdagangan Positif dan semangat kerja tinggi, karena permintaan terhadap produk marmer tidak hanya berupa hiasan atau souvenir akan tetapi juga berupa barang kebutuhan seperti meja, porselin dll. hal tersebut lah yang memicu semangat kerja tinggi para pengusaha ikm untuk lebih meningkatkan dan menginovasi hasil karya nya.
- 3) Melakukan Kerjasama, dalam menciptakan suatu peluang untuk mewujudkan dukungan atas perkembangan produk marmer dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, karena masukan dari lembaga manapun sangat bermanfaat demi mengembangkan ekonomi lokal, lalu

perbankan, dengan bantuan modal dari bank tentunya itu sangat membantu untuk proses pengerjaan marmer karena pelaku usaha sendiri terkadang melemparkan pesanan kepada pelaku ikm lain karena alasan modal. Jadi kerjasama tersebut sangat membantu.

b. Faktor Penghambat pemberdayaan LED

- 1) Tenaga ahli yang terbatas, dimana SDM (Sumber Daya Manusia) atau tenaga ahli di bidang masih memerlukan pelatihan tambahan dari Disperindag Kabupaten Tulungagung untuk mencetak semua tenaga ahli yang berkompeten.
- 2) Kurangnya aturan pendukung, kebanyakan kelompok kerja IKM yang tergolong masih rendah apabila ada pesanan dalam jumlah banyak atau tidak bisa mengerjakan akan dipesankan pada kelompok kerja IKM yang besar atau lebih senior, karena alasan modal dan jumlah nya yang banyak, jadi kelompok kerja kecil tersebut hanya mengakui bahwa pekerjaan itu hasilnya sendiri. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan aturan pendukung untuk setiap pekerjaan pelaku ikm.
- 3) Promosi yang kurang terkoordinir oleh Disperindag. Kondisi ini membuat sistem pemasaran tidak jelas dan akhirnya pemanfaatanya juga tidak bisa digunakan secara optimal.
- 4) Produksi marmer yang membutuhkan waktu lebih, memungkinkan untuk mengurangi daya saing terhadap produk sejenis seperti *furniture* berbahan dasar kayu. Sumber Daya Manusia yang kurang juga mempengaruhi kualitas hasil produksi marmer.

B. Saran

1. Pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh Disperindag kabupaten Tulungagung seharusnya memberikan peningkatan kualitas tenaga ahli yang mampu memberikan peningkatan teknologi dalam kualitas produk marmer yang dihasilkan dengan melakukan pelatihan khusus dan terstruktur.
2. Pemberdayaan IKM dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas sebagai sarana pendukung seperti adanya peminjaman alat berat sebagai sarana untuk mengambil bahan baku marmer, selain hal tersebut, perlu adanya peraturan yang memberikan keringanan kepada pengrajin marmer untuk melakukan eksploitasi produk dan pemasaran.
3. Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Disperindag seharusnya memberikan kemudahan dalam kebutuhan dana bagi pengrajin kecil sehingga perputaran produksi IKM tidak hanya dirasakan oleh pengrajin besar, melakukan promosi hasil produksi marmer tidak hanya dengan melakukan bazar atau display produk skala kabupaten akan tetapi harus dapat melakukan promosi keluar daerah guna meningkatkan penjualan produk IKM dalam penelitian ini berupa produk Marmer.
4. Kualitas merupakan salah satu parameter yang diperhitungkan dalam keputusan konsumen untuk membeli produk. Perbaiki kualitas produk diimbangi dengan peningkatan *cost*. Mengacu pada LED yang diterapkan, Tata kelola IKM Marmer di Kecamatan Besuki dilandasi dengan azas kekeluargaan dengan tidak memberikan penekanan atau penetrasi terlalu berlebih, karena posisi setiap pengrajin tidak tersentralisasi pada suatu

daerah tertentu maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pemberdayaan dengan menyesuaikan pola perkembangan IKM marmer tersebut.

5. Secara ekonomis dan dinikmati berbagai pihak yang berarti sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi dan begitu pula hak mereka dalam penggunaan bahan galian yang memadai serta bantuan teknis yang terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

Arista, Fany dan Baldric Siregar. 2009. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* vol. 3, No. 1 Maret 2009. STIE; Yogyakarta

Badan Pencatatan Statistik Kabupaten Tulungagung, 2014

Bambang, Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Jakarta : Bayumedia Publishing

Blakely, EdwardJ.1989. *PlanninLocalEconomicDevelopment:Theory and LED*

Cooper dan Emory, 1996, Metode Penelitian Bisnis, Jakarta:Erlangga.

Darmadi & Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 2016

FAO.1995.*PLANNINGFOR SUSTAINABLEUSE OF LANDRESOURCES:Toward a new Approach*. Rome:FAOLand andWater Bulletin.

fendy, Onong kencana. 2006. *Ilmu, Teori, Filsafat Komunikasi dan administrasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

HadariNawawi, et.al. 2006. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta : UGM Press

Hafsah, Muhammad Jafar Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

HIS.2006.*ConceptofLocalEconomicDevelopment*.Rotterdam:CourseMaterialof

Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2008). “*The Relationship between Governance Effectiveness and Entrepreneurship*”. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 1 No. 17 [Special Issue – November 2011].

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga

Mardikanto dan Soebito, 2012: 27 pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: alfabeta

Marrus, Stephanie K.. 2001. *Building the strategic plan: find, analyze, and present the right information*. Wiley. USA

Mintzberg, Henry dan Quinn, James Brian. 1996. *The Strategy Process; Concept, Context, Cases .3rd Edition*. Prentice: Hall International Editions.

Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Notoatmodjo, 2009 pengembangan sumber daya manusia. Jakarta: Rineka cipta

Organisasi Perburuhan Internasional (2005: 29)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Planning Local Economic Development (1989).

Porter, M.E (1980) *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, the Free Press, New York Practice. Sage Publication.

Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Sabirin, 2000. *Konsep, Model Dan Analisis Serta Strategi Program Small Estate Model Polikultur*. Yayasan bina keterampilan pedesaan.

Sabirin, Dkk. 2010. *Modul Sekolah Lapang Polikultur*. Medan: BITRA Indonesia.

Said, Abdullah. 2012. *Konsep LERD. RCCP (Research Centre for Conflict and Policy) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang: Makalah disampaikan dalam Program Diklat Substantif Local Economic Resources Development (LERD)*. 34 halaman.

Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sari, Ayu Multika. 2014. *Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. (Studi Pada Dusun Kungkuk Desa Punten Kota Batu)*. Skripsi. Un-published

Shardlow, Steven. (1998). *Values, Ethics and Social Work*.

Siagian, SondangP. 2009. *AdministrasiPembangunan(Konsep, Dimensi, danStrateginya)*. Jakarta:BumiAksara

Siagian, SondangP. 2012. *AdministrasiPembangunan: Konsep, DimensidanStrateginya*).

Siagian, SondangP. 2012. *ManajemenStratejik*. Jakarta:PT. BumiAksara.

Siagian, Sondang. 2009. *Manajemen SDM*. Cet 16. Jakarta : Bumi Aksara.EdisiKetujuh. Jakarta: BumiAksara.

Sudaryanto, Ragimun, danRinaWijayanti. 2008. *StrategiPemberdayaan UMKM MenghadapiPasarBebasAsean*

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syafri, Wirman. 2011. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Thomson, A.,A., dan Strickland, A.J.(2001) *Strategic Management, Concepts and Cases, 12th Edition*, McGraw-Hill, Singapore

Umar, H. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

UndangUndang no 20 tahun 2008 tentang UMKM

UndangUndang No.23 Tahun 2014 TentangPemerintahandaerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 5 tentang tujuan pemberdayaan

Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahandaerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang urusan pemerintah kabupaten/ kota di bidang ekonomi

Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Yeremias. T. Keban. 2008 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media,

Yunitasari, Cindy. 2013 *Analisa Faktor-Faktor Pembentuk Personal Branding dari C.Y.N. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol. 1, No. 1, (2013) 1-8*

Zahra (1993-1996). "The Effects of Organizational Culture on Corporate Entrepreneurship". *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 5, No. 5(1); April 2014.

